PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILISASI HARGA MELALUI OPERASI PASAR MURNI (OPM) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DINAS PERINDAG DIY)

The Role Of Government In Maintaining The Price Stability through Pure Market Operation (OPM) Based on the Islamic Economic Perspective (Case Studies In Industry and Trade Office DIY)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari

Program Studi Ekonomi Islam

Oleh :

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh

14423010

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh
NIM	: 14423010
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah Dalam MenjagaStabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Persperktif Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2018 M



Zakka Hifzhan H.F

ii

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 4 Oktober 2018
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam
Disusun oleh	: ZAKKA HIFZHAN HANIFAN FADHLULLOH
Nomor Mahasiswa	: 14423010

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag	(.....)
Penguji I	: Junaidi Safitri, SEI, MEI	(.....)
Penguji II	: Dr. Siti Achiria, SE, MM	(.....)
Pembimbing	: Soya Sobaya, SEI, MM	(.....)

Yogyakarta, 9 Oktober 2018
Dekan

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama	: Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh
Nim	: 14423010
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Oktober 2018 M

Soya Sobaya, S.E.I., M.M.

iv

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 748/Dek/60/DAS/FIAI/III/2018 tanggal 6Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh
Nomor/Pokok NIM	: 14423010
Program Studi/Konsentrasi	: Ekonomi Islam/Keuangan Publik Islam
Tahun Akademik	: 2017/2018
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing

Soya Sobaya, SEI., MM.

V

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah, atas banyak rahmad dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT yang telah memberikan banyak kekuatan, ketabahan dan keajaiban sehingga pada akhirnya saya dapat meyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini dan semoga kita termasuk didalam golongan yang kelak akan mendapatkan syafa'at di akhir zaman.

Saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang saya sayangi dan pihak-pihak yang turut mebantu dalam menyelesaikan serta *support* yang begitu banyak, saya ucapkan terimakasih kepada:

Kepada kedua Orang tuaku dan Saudara-saudariku, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga atas segala bentuk dukungan dan do'a, kasih saying dan *support* ketika saya terjatuh, menatih saya ketika mulai bangkit dan mendorong saya untuk melaju lebih cepat lagi.

Kepada teman-teman baik dari lingkup kampus maupun luar kampus yang selalu ada disaat suka maupun duka dan selalu memberikan banyak pelajaran bagi saya pribadi yang telah mengajarkan saya betapa indahnya pertemanan dan semoga apa yang telah teman-teman lakukan semuanya dapat dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda, Aamiin

Kepada dosen pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan banyak sekali waktu dan semangat juang yang dapat memberikan saya contoh yang baik serta pengarahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik pula..

LEMBAR MOTTO

"Kegagalan seharusnya merupakan batu loncatan dan bukan batu sandungan"

-Abraham Lincoln-

"Kebahagiaan mendahului keberhasilan. Maka awalilah semuanya dengan suka cita; Bahagia!"

-Amanda Gore-

"Don't ever let somebody tell you, you can't do something"

-Chris Gardner-

"Kau tidak bisa mengendalikan hasilnya, hanya usahamu yang bisa kau kendalikan"

-Dan Millman-

"Whatever you get, accept it and deal with it"

-Andrew Matthews-

"The noblest art is that og making others happy"

-Mt Barnum-

ABSTRAK

Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam

Oleh

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh

(14423010)

Peran pemerintah dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan. Stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak sekali program yang dilaksanakan pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga demi mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya yang hidup dibawah standar kemiskinan salah satunya dengan cara mengadakan Operasi Pasar Murni (OPM). Operasi Pasar merupakan suatu kegiatan untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang, yang dilakukan dengan cara injeksi, untuk meningkatkan suplai melalui pedagang swasta, BUMN, atau langsung ke pedagang eceran dengan cara penetapan harga dengan harga dibawah harga pasarnya. Merujuk pada salah satu kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) ini mempertanyakan peranan Ekonomi Islam untuk menganalisis program Operasi Pasar Murni (OPM) tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran Ekonomi Islam dalam program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian kualitiatif digunakan sebagai desain utama penelitian ini untuk mendapatkan gambaran program kerja Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilaksanakan pemerintah serta didukung dengan penelitian kuantitatif yang digunakan sebagai desain pendukung dengan cara pengambilan sampel sebanyak 30 responden dengan menggunakan metode *purposive sample* yaitu masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui manfaat dari adanya program Operasi Pasar Murni (OPM) tersebut. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dari ekonomi islam yaitu kemaslahatan umat.

Katakunci : Peran Pemerintah, Stabilisasi, Operasi Pasar Murni, Ekonomi Islam

ABSTRACT

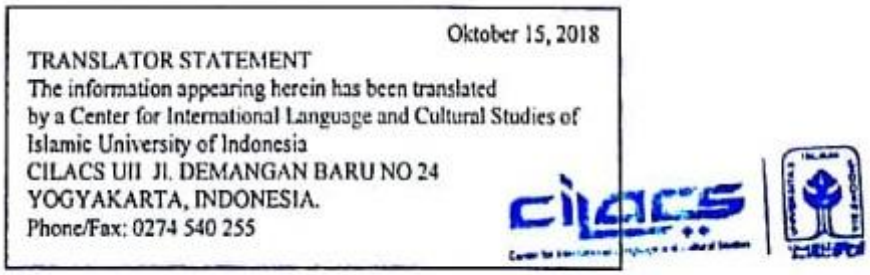
The Role of Government in Maintaining the Price Stability through Pure Market Operation (OPM) Based on the Islamic Economic Perspective

By:

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh
(14423010)

The role of government in economic sector is one form of government intervention in creating the welfare. Stability is an action to maintain a price of product/goods or service at certain level done by the government. There are many programs that have been issued by the government to maintain the price stability to fulfil the needs of community particularly for those living under the poverty standard; one of which is by holding OPM (Pure Market Operation). Market operation is an activity to prevent any price increasing to a product through an injection to increase the supply through private traders, BUMN or directly to the retailers by determining a price under the market price. Referring to one of government policies in maintaining the price stability through OPM, this research attempts to question the Islamic economic role to analyze the Pure Market Operation program. Thus, the aim of this research is to explain and analyze the Islamic economic roles in the Pure Market Operation Program done by the government. This research used the qualitative approach as the main design to obtain a description of the program of Pure Market Operation implemented by the government. This research also used the supporting design in the form of quantitative research in which 30 respondents that have previously joined the activity of Pure Market Operation were involved in sampling by means of the sampling purposive method to figure out the benefits of the program. The result of the research showed that Pure Market Operation Program done by the government has been in line with the goal of Islamic economics that is for the benefit of people.

Keywords: Government Role, Stability, Pure Market Operation, Islamic Economics



KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan

Transliterasi Arab- Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai

keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata

9. Huruf kapital

10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri darivokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ___	Fathah	A	A
◌ِ ___	Kasrah	I	I
◌ُ ___	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - żukira

يَذْهَبُ - yażhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ىَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ- qāla　　قِيْلَ - qĭla

رَمىَ- ramā　　يقَوْلُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالأَطْفاَلُ - raudah al-atfãl

- raudatul atfãl

المَدِيْنَةَالمُنوَّ رَةٌ - al-Madĭnahal-Munawwarah
- al-Madĭnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا– rabbanā الحَجّ- al-hajj
نَزّلَ– nazzala البرِ- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجُلُ- ar-rajulu	القَلَمُ- al-qalamu
السيِّ دُ- as-sayyidu	البدِيْعُ- al-badĭ'u
الشمْسُ- as-syamsu	الجَلاَلُ- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تـأْخُذَوْنَ- ta'khużūna	إِ ّ نِ- inna
النَّ وْءُ- an-nau'	أمِرْتُ- umirtu
شَّيْئٌ- syai'un	أكَلَ- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّاللهَلَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqĭn Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān Wa auf al-kaila wal mĭzān
إِبرَاهِيْمُ الْخَلِيل	Ibrāhĭm al-Khalĭl Ibrāhĭmul-Khalĭl
بِسمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاها	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَللهِعَلَىالنَّاسِحِجُّالْبَيْتِمَنِاسْتَطَاعَإِلَيْهِ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabĭla Walillāhi ‘alan-nāsihijjul-baitimanistatā’a ilaihi sabĭlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّأَوَّلَبَيْتٍوُضِعَلِلنَّاسِلَّلَّذِىبِبَكَّةَمُبَارَكاً	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażĭ bibakkata mubārakan

شَهْرُرَمَضَانَالَّذِىأُنْزِلَفِيْهِالْقُرْاٰنُ	Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur'ānu Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭhil Qur'ānu
وَلَقَدْرَاٰهُبِالأُفُقِالْمُبِيْنِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubĭn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubĭn
اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamĭn Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِّنَاللهِوَفَتْحٌقَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarĭb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعاً	Lillāhi al-amru jamĭ'an Lillāhil-amru jamĭ'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alĭm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا، تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وُرَسُوْلُهُ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi-nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Kemudian, sebagai sebagian dari pesyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *"Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam"*.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D,selaku Rektor Universitas Islam Indonesia .
2. Bapak Drs. H. M. Tamyziz Mukharram, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. Selaku Ketua Prodi Ekonomi islam dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenanan membimbing penyusun dalam skripsi ini.
5. Kedua Orang tua saya tercinta, Bapak Kusbiantoro dan Ibu Harmini yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak atas kasih sayang, dukungan moral, materi dan doa yang tiada jeda dan henti.
6. Saudara/i saya, Zulfikri Fakhrul Hilmi dan Zachri Maghriza Firly yang selalu menjadi motivasiku untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa dan dukungan serta semangatnya hingga titik ini.
7. Keluarga organisasiku REMAIS AL FURQON, TAKMIR AL FURQON dan ORGANISASI PEMUDA BANGUNREJO yang senantiasa memberikan pengalaman sehingga saya menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat
8. Segenap Teman-teman desa (Yudhi, Catur, Nando, Opita, Desta dkk)yang mengajarkan bahwa Piknik adalah sebagian dari jalan kesuksesan.
9. Segenap Teman-teman Kampus (Azis, Ikhsan, Angga, Habril, Akif dll) yang mengajarkan saya bahwa Game adalah sesuatu yang tidak akan menertawakan anda ketika anda bersedih.
10. Segenap Teman-temen KKN angkatan 55 Unit 152&153 yang banyak memberikan contoh yang baik, teman seperjuangan, merangkul dan memberikan arti dari sebuah pertemanan serta menjadikan kita keluarga kecil yang ramah.

11. Segenap Teman-teman satu bimbingan Ibu Soya Sobaya, yang selalu memberikan support serta antusias sehingga timbullah rasa semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk Sahabat-sahabat Aliyyah saya (Aisyah, Putri, Shera, Rizki, Dimas, Cae dll) sekaligus nama yang selalu terukir dalam do'a. Terimaksih dan semoga kita selalu didekatkan Oleh Allah SWT dalam Do'a.
13. Seluruh keluargaDISPERINDAG DIY Bidang Dalam Negeri yang membantu penyusunan skripsi ini.
14. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
15. Staff akademik Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu penyusun dalam pembuatan surat-surat terkait penyusunan skripsi sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan lancar.
16. Seluruh pihak-pihak yang terlibat membantu dalam penyusunan penyusunan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Oktober 2018

Penyusun



Zakka Hifzhan Hanifan F.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
REKOMENDASI PEMBIMBING iv
NOTA DINAS v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
HALAMAN MOTTO vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT x
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
KATA PENGANTAR xxiv
DAFTAR ISI xxv
DAFTAR TABEL xxviii
DAFTAR GAMBAR xxix
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Sistematika Penulisan 6
BAB II KERANGKA TEORI/LANDASAN TEORI 7
A. Telaah Pustaka 7
B. Landasan Teori 15
1. Peran Pemerintah 14
2. Konsep Stabilisasi Harga dalam Pandangan Islam 23
3. Konsep Keseimbangan Pasar 25
4. Konsep Mekanisme Pasar 26

5. Operasi Pasar Murni 28
C. Kerangka Berfikir 29
BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Desain Penelitian 30
B. Lokasi Penelitian 30
C. Populasi dan Sampel 30
D. Sumber Data 31
E. Teknik Pengumpulan Data 32
F. Teknik Analisis Data 33
G. Definisi Konseptual dan Operasionela Variabel 34
H. Instrumen Penelitian 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 38
B. Analisis Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Barang Komoditas melalui Operasi Pasar Murni (OPM) DISPERINDAG DIY 40
1. Analisis Peran Pemerintah 40
2. Analisis Praktik Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) DISPERINDAG DIY 45
3. Analisis Operasi Pasar Murni (OPM) dan Komoditas DISPERINDAG DIY 46
C. Hasil Data Karakteristik Responden Penerima Manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) DISPERINDAG DIY 47
1. Analisis Peran Pemerintah 51
2. Analisis Stabilisasi Harga 58
3. Analisis Operasi Pasar Murni 61
D. Pembahasan Hasil Penelitian 64
1. Peran Pemerintah 64
2. Stabilisasi Harga 70
3. Operasi Pasar Murni 71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran..... 74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1	Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	34
Tabel 4.1	Struktur Organisasi DISPERINDAG DIY Bidang Dalam Negeri	39
Tabel 4.2	Daftar Harga OPM Kedung Keris, Gunung Kidul, DIY	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hukum Keseimbangan Pasar	26
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1	Bagan Usia Partisipan OPM Kedung Keris	48
Gambar 4.2	Bagan Pekerjaan Partisipan OPM	49
Gambar 4.3	Bagan Pendapatan Penerima Manfaat OPM	50
Gambar 4.4	Bagan Pengenalan OPM terhadap Masyarakat	51
Gambar 4.5	Bagan Informasi tentang OPM	52
Gambar 4.6	Bagan Ketepatan Waktu dilaksanakannya OPM	53
Gambar 4.7	Bagan Keamanan Barang OPM Setelah diterima Masyarakat	54
Gambar 4.8	Bagan Sasaran Kegiatan OPM	55
Gambar 4.9	Bagan OPM sebagai Program Kestabilan Harga	56
Gambar 4.10	Bagan Alokasi OPM	57
Gambar 4.11	Bagan Manfaat OPM Terhadap Kestabilan Harga	58
Gambar 4.12	Bagan Penetapan Harga	59
Gambar 4.13	Bagan Kesepakatan Harga	60
Gambar 4.14	Bagan Penerapan Harga dalam OPM	61
Gambar 4.15	Bagan Selisih Harga dalam OPM	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modern ini bersamaan dengan bertumbuhnya suatu *mobilitas capital* dari suatu negara merupakan suatu yang tidak dapat dipungkiri dari liberalisasi perdagangan dalam satu sisi juga telah melahirkan beberapa ketimpangan dalam hal ekonomi negara. Disisi lain, islam mengangkat konsep peran dari suatu negara di bidang ekonomi dengan basis universal islam seperti adanya keadilan dalam hal perekonomian yang dari adanya redistribusi pendapatan baik melalui zakat maupun jaminan sosial dan larangan riba (Hidayatullah, 2013)

Menurut Ibnu Khaldun dalam Munir (2006) menganalisa bahwa lemah-kuatnya peran pemerintahan tergantung pada komitmennya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa ada keadilan loyalitas masyarakat tidak akan ada, bila tidak ada loyalitas maka tidak akan ada lingkungan yang mendukung implementasi syari‟ah, hukum dan perundang-undangan, pembangunan dan kemakmuran. Ketiadaan itu akan menyebabkan administrasi politik dan pemerintahan menjadi lemah dan tidak efektif, yang bila dibiarkan akan menuju kehancuran

Pasar tradisional merupakan salah satu sarana umum yang keberadaannya sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat sekitar, khususnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu dalam hal pangan (Widodo, 2013). Pengertian pasar dalam arti sempit adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang. Sedangkan pengertian pasar dipakai dalam arti yang lebih luas yaitu dimana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada suatu tempat tertentu

saja maupun pada hari tertentu (Gilarso, 2014). Jadi, Pasar merupakan tempat penyedia barang komoditas seperti: Beras, Minyak, Gula, Telur dll. dimana barang-barang tersebut menjadi bahan pokok konsumsi masyarakat yang tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pasar sebagai fasilitas maka dapat meningkatkan ketahan pangan di Indonesia.

Inflasi merupakan kejadian dimana terjadi kenaikan harga umum secara terus menerus. Peristiwa ini akhirnya menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perekonomian (Wulandari, 2012). Inflasi merupakan proses har-harga barang jasa secara umum dan berkelanjutan. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti momen hari raya seperti perayaan Natal dan Tahun Baru (tidak terus menerus) dan kenaikan dari harga satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali kenaikan itu tidak hanya satu tempat saja (atau mengakibatkan kenaikan) pada barang lainnya (Priyo, 1996). Inflasi yang terjadi mempunyai dampak yaitu kemiskinan dimana inflasi meningkat maka kemiskinan juga semakin bertambah(Wulandari, 2012). Jadi, dapat dikatakan inflasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan dan kemiskinan suatu masyarakat dan stabilitas harga-harga pasar yang menjadi sarana kebutuhan pokok masyarakat.

Sebagaimana keterangan hasil olah data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) menyatakan inflasi di Indonesia mengalami kenaikan dari 3,02% di tahun 2016 menjadi 3,61% ditahun 2017. Dari data yang diperoleh maka dapat dikatakan tingkat inflasi di Indonesia tergolong rendah. Rendahnya laju inflasi juga dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam menghambat laju inflasi di daerah-daerah provinsinya. Tidak hanya peran pemerintah saja tetapi pasar merupakan salah satu kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan akan konsumen sehingga dengan adanya stok barang yang disediakan pasar untuk konsumen maka akan menghambat laju inflasi di daerah tersebut.

Dengan adanya inflasi maka dapat berdampak kepada kemiskinan masyarakat. Kemiskinan dalam pengertian konvensional adalah apabila

pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu Kemiskinan dapat pula dipahami sebagai kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Definisi lain yang biasa digunakan adalah menurut European Union bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas (Sukandar et al., 2008)

Berdasarkan pada olah data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) jumalh penduduk masyarakat miskin di Privinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga bulan Sepetember 2017 mencapai 466,33 ribu jiwa hal ini tercatat lebih sedikit daripada tahun 2016 yang tercatat mencapai 488,83 ribu jiwa. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa berbagai kebijakan dari pemerintah telah dilaksanakan untuk menciptakan kesejahteraan salah satunya dengan cara memberantas kemiskinan bagi warga sekitar khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tidak hanya pasar yang menjadi faktor penentu laju perekonomian dan inflasi di daerah tersebut, melainkan peran pemerintah juga turut mempengaruhi laju inflasi dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di daerah tersebut sehingga dapat menjadikan laju inflasi terhambat. Melihat lambatnya laju inflasi, maka harga-harga barang komiditas seperti sembako dll tidak akan mengalami kenaikan harga secara signifikan. Adanya kenaikan harga pada bahan pokok maka dapat menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan masyarakat. Sehinngga pemerintah memerlukan kebijakan untuk menanggulanginya.

Berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menstabilisasi harga-harga barang komoditas salah satunya adalah dengan

Operasi Pasar Murni (OPM). Operasi Pasar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau kerjasama pemerintah dengan lembaga usaha baik distributor mapun sagas pangan untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang, yang dilakukan dengan cara injeksi maupun subsidi, untuk meningkatkan suplai melalui pedagang swasta, BUMN, atau langsung ke pedagang eceran pada waktu harga melonjak atau dengan operasi pasar murah (Maisyarah, Pratiwi, & Sutopo, 2014).

Tidak hanya menjaga stabilisasi harga, Operasi Pasar Murni (OPM) juga bertujuan untuk menjaga pasokan barang komoditas disetiap pasar apabila terjadi pergerakan harga yang terjadi baik seperti adanya inflasi atau memasukan hari-hari besar di Indonesia yang mengakibatkan harga disetiap pasar melonjak dengan cepat. Selain itu, Operasi Pasar Murni (OPM) juga bertujuan untuk mernganken beban masyarakat yang berkehidupan dibawah standar kelayakan, karena Operasi Pasar tersebut menjual barang komoditas yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harga barang tersebut dibawah harga pasar yang ada.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap harga pangan yang selalu berubah-ubah dan bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga-harga barang komoditas melalui Operasi Pasar Murni berdasarkan pengamatan penulis masih relatif jarang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILISASI HARGA MELALUI OPERASI PASAR MURNI (OPM) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DINAS PERINDAG DIY)"**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang mengenai sejauh mana peran pemerintah dalam menstabilkan harga barang dalam program Operasi Pasar Murni (OPM) maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana peran pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) dari DISPERINDAG DIY perpektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada permasalahan terhadap kurang stabilnya harga-harga barang komoditas di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka tujuan dari penelitian ini adalah enganalisis praktik peran pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) dari DISPERINDAG DIY perpektif ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan Operasi Pasar Murni yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY yang sesuai dengan pengamalan syariat islam.

2. Secara Akademis
   a. Bagi pemerintah, diharapkan menjadi masukan dalam melakukan pengembangan Operasi Pasar Murni (OPM) guna menstabilkan harga-harga barang komoditas yang sesuai dengan syariat islam.
   b. Bagi akademisi, dapat menjadi penambah khasanah keilmuan dengan mengetahui penerapan Operasi Pasar Murni (OPM) sesuai dengan

pandangan ekonomi islam dan kemudian menjadi acuan dalam melakukan dan menerapkannya dalam muamalah.

c. Bagi penulis agar menambah wawasan berfikir, terutama melalui pemecahan permasalahan tentang bagaimana peran pemerintah dalam program penstabilan harga melalui Operasi Pasar Murni yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang masalah, rimusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang telaah pustaka dan pembahasan teori yang terkait dengan objek penelitian yang bersifat teoretis yang berisi tentang Peran pemerintah, Stabilisasi harga dan indikator, mekanisme pasar, keseimbangan harga, Operasi Pasar Murni (OPM) dan pandangan terhadap ekonomi islam.

Bab ketiga berisi tentang metode dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian dan teknik analisis data..

Bab keempat merupakan analisis terhadap hasil penelitian. Pada bab ini dipaparkan gambaran umum mengenai analisis peran pemerintah dalam program Operasi Pasar Murni yang dilaksanakan Oleh DISPERINDAG DIY dalam menstabilkan harga komoditas

Bab kelima adalah penutup yang berisis tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Saran adalah masukan yang diberikan oleh pelaksana program Operasi Pasar Murni (OPM) dan yang terkait.

BAB II

KERANGKA TEORI/ LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih mendalam, ada beberapa penelitian yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan penulis. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun tentunya ada sudut perbedaan, dari pembahasan maupun obyek yang dikaji dalam penelitian. Untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam terhadap obyek yang akan diteliti oleh penulis. Sejauh ini pembahasan tentang pengendalian harga pasar melalui Operasi Pasar Murni cukup banyak pembahasannya. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan tingkat efektifitas pengendalian suatu harga pasar dengan cara Operasi Pasar Murni.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2012) dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Provinsi di Indonesia" Penelitian ini menganalisis menggunakan data panel yang meliputi data *cross section* sebanyak 33 provinsi dan *time series* selama 5 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data penelitian berupa data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh dalam meningkatkan potensi adanya kemiskinan di Indonesia sehingga perlu adanya peran pemerintah dan kebijakan pemerintah dala menekan laju inflasi tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan olehKurniawan (2010) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar" penelitian ini membahas mengenai kesuaian operasi pasar dalam tinjauan hukum islam. Menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mendiskripsikan pemikiran Ibnu Qayyim, kemudian pemikiran tersebut diananlisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berhak melakukan penetapan harga regulasi pasar terutama apabila terjadi sebuah ketidak adilan dan penimbunan. Dan oparasi pasar sudah sesuai dengan kaidah hukum islam karenan didalamnya mengandung unsur maslahat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2007) dengan judul "Dampak Operasi Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Kota Pekalongan" penelitian ini membahas mengenai dapak dari adanya operasi pasar modern terhadap perdagangan pasar tradisonal di Pekalongan. Menggunakan metode Analisis diskriptif dan pengujian normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan adanya operasi pasar modern yang di lakukan di Pekalongan ternyata hanya berdapak sebesar 26% saja terhadap pedagang pasar tradisonal.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum, Harianto dan Sinaga (2010) yang berjudul "Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah Terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia" Penelitian ini membahas mengenai bagaimana dampak adanya harga permintaan dan penawaran harga beras di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode data dan sumber data (*time series*) dan pendugaan *stage least square.* Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga penawaran beras adalah produksi beras di Indonesia,

jumlah beras untuk benih, stok beras akhir tahun. Sedangkan permintaan beras dipengaruhi oleh harga beras eceran, jumlah penduduk di Indonesia, pendapatan penduduk Indonesia. Dengan adanya kenaikan harga sebesar 15% maka akan berdapak kepada peningkatan produksi padi.

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Maisyaroh, Pertiwi, Hisjam, dan Sutopo (2014) dengan judul " Model Penentuan Operasi Pasar Untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minya Curah"penelitian ini membahas tentang Operasi pasar murah minyak goreng untuk membantu menstabilkan harga dan menjaga kestabilan ketersidiaan di masyarakat daerah Surakarta. Metode yang digunakan adalah metode pusat gravitasi. Hasilnya menunjukkan bahwa operasi pasar murah hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan jangka pendek saja. Operasi Pasar Murah di Surakarta digelontorkan oleh pemerintah sebesar 4,913,05 kg minyak curah yang dijual Rp. 10.500/kg. hal tersebut bertujuan untuk menghndari lonjakan harga minyak di Surakarta.

Keenam,penelitian yang di lakukan oleh Tatuh (2015) dengan judul "Analisis Pengelolaan persediaan Beras di PT Semarak Kota Bitung" penelitian ini membahas tentang pengelolaan yang dilakukan PT Semarak dalam persediaan beras untuk masyarakat Kota Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode *economic order quantity (EOQ).* Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan perusahaan Semarak dalam pengelolaan persediaan beras masih belum efisien, begitu pula dengan pemesanan yang belum ekonomis.

Ketujuh,penelitian yang dilakukan oleh Zulham (2016) dengan judul "Kebijakan Operasi Pasar dan Pasar Beras di Nangroe Aceh Darussalam" penelitian ini membahas tentang bagaimana intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga beras di NAD. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode data sekunder dan primer. Data sekunder didapatkan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura. Perum Bulog Divre NAD. Dan data primer didapatkan melalui survey dengan teknik "*snow ball"* yang ditelusuri mulai dari petani, pedagang, perusahaan penggilingan padi dll. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan operasi pasar beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divre NAD belum efisien dalam menekan harga beras pada tingkat konsumen.

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Rahmasuciana et al. (2015) dengan judul "Pengaruh Pengadaan Beras dan Operasi Pasar terhadap Harga Beras Dalam Negeri" penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh dari operasi pasar terhadap pengadaan beras dalam negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara satu faktor dengan lainnya yang disajikan secara sistematis, akurat dan faktual. Hasil dari penelitian tersebut adalah Operasi Pasar Murni (OPM) bersifat berpengaruh positif terhadap stabilisasi harga beras namun bersifat lemah. Ketersediaan beras juga dipengaruhi dari luas lahan panen dan disparitas suatu harga.

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	**Nama Penulis /Tahun/Judul**	**Hasil Penelitian**	**Perbedaan Dan Persamaan**
1	Fransiska Hastin Wulandari (2012) Pengaruh pertumbuhan ekonomi,inflasi,pengangguran dan pendidikan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis bagaimana

No	Nama Penulis /Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan
	terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2012	kemiskinan masyarakat. dimana kemiskinan masyarakat tersebut didasarkan terhadap inflasi yang menekan harga-harga barang kebutuhan.	pertumbuhan ekonomi menyangkut kebutuhan masyarakat miskin sedangkan perbedaannya terletak pada kurang disinggungnya peran pasar dalam mengurangi dampak inflasi.
2	Wawan Kurniawan (2010) Tinjauan hukum islam terhadap intervensi pemerintah dalam stabilitas harga melalui operasi pasar	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme operasi pasar telah sesuai dengan hukum dan syariat islam karena didalamnya mengandung unsure kemaslahatan bagi umat	Persamaan dengan penelitian ini adalah konsep syariah yang diterapkan pada program operasi pasar sedangkan perbedaanya terletak pada dalam pengambilan data yang secara umum dan kuran terperinci.
3	Dwi Susilo (2007) Dampak Operasi pasar modern terhadap perndapatan pedagang	Dari hasil penelitian ini menujukkan bahwa keberaan pasar modern menjadi	Persamaannya penelitian ini terletak pada disinggungnya konsep stabilisasi

No	Nama Penulis /Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan
	pasar tradisional di kota pekalongan	kendala dalam pendapatan bagi pedagang di pasar tradisonal karena adanya pasar tiban yang membuat harga pasar tradisonal menurun	harga pasar yang memperngaruhi pendapatan produsen sedangkan perbedaannya terletak pada kurangnya pembahasan mengenai intervensi pemerintah didalamnya
4	Ria Kusumaningrum, harianto, bonar M. Sinaga (2010) Demapak kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap penawaran dan permintaan beras di Indonesia	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga penawaran beras adalah produksi beras di Indonesia, jumlah beras untuk benih, stok beras akhir tahun. Sedangkan permintaan beras dipengaruhi oleh harga beras eceran, jumlah penduduk di Indonesia, pendapatan penduduk Indonesia.	Persamaan dalam dengan peneltian ini adalah pada konsep harga dalam menjaga stabilitas harga pasar sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode *time series* dan kurangnya penjelasan mengenai konsep islami didalamnya

No	Nama Penulis /Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan
		Dengan adanya kenaikan harga sebesar 15% maka akan berdapak kepada peningkatan produksi padi	
5	Anis Maisyarah, Ayu pertiwi, Muh. Hisjam dan wahyudi sutopo (2017) Model penentuan operasi pasar untuk mendukung stabilisasi harga minyak goreng curah	operasi pasar murah hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan jangka pendek saja. Operasi Pasar Murah di Surakarta digelontorkan oleh pemerintah sebesar 4,913,05 kg minyak curah yang dijual Rp. 10.500/kg. hal tersebut bertujuan untuk menghndari lonjakan harga minyak di Surakarta.	Persamaan dengan penelitian ini terletask pada stabilisasi harga bahan komoditas dalam operasi pasar sedangkan perbedaannya terletak pada kurang disinggungnya konsep islam didalamnya.
6	Danie Setiawan (2015) Analisis Pengelolaan persedian beras di PT	Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan perusahaan	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kurangnya

No	Nama Penulis /Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan
	Semarak Kota Belitung	Semarak dalam pengelolaan persediaan beras masih belum efisien, begitu pula dengan pemesanan yang belum ekonomis. Hal ini ditunjukkan dengan biaya persediaan perusahaan lebih besar dibanding dengan hasil analisis menggunakan metode EEQ	optimal distribusi bahan pangan (beras) sedangkan perbedaannya terletak pada kurang disinggungnya dalam metode yang sesuai dengan syariat islam didalamnya.
7	Armen Zulham dan M. Ferizal (2016) Kebijakan operasi pasar dan pasar beras di NAD	Kebijakan operasi pasar beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divre NAD belum efisien dalam menekan harga pasar pada tingkat konsumen. hal tersebut dikarenakan kurang adanya necara bulanan dan	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga pasar khususnya barang komoditas yang dibutuhkan masyarakat. perbedaannya terletak pada metode yang

No	Nama Penulis /Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan
		pendalaman terhadap segmen pasar di NAD	disajikan dengan kuantitatif dan kurang adanya pembahasan mengenai syariat islam didalamnya
8	Dioni Yurinda Rahmasuciana, Dwidjono Hadi Darwanto, Masyhuri (2015) Pengaruh pengadaan beras dan operasi pasar terhadap terhadap harga beras dalam negeri	Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan dalam pengadaan beras dalam negeri dapat menstabilkan harga meskipun pengaruhnya sedikit. Faktor lain dalam mempengaruhi pengadaan beras adalah luas panen dan disparatif suatu harga.	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kegiatan Operasi Pasar dalam menjaga stabilisasi harga lewat pengadaan beras. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada nilai-nilai keislaman yang belum dimuat didalamnya.

B. Landasan Teori

1. Peran Pemerintah

Dalam sejarah Islampun terlihat bagaimana pentingnya pemerintahan. Rasulullah Saw. telah berusaha dengan segala kemampuannya untuk mendirikan pemerintahan yang menjunjung syariah. Karena itu Rasulullah saw. menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab untuk beriman dan

kemudian melindungi da‟wahnya, hingga akhirnya datang orang-orang Anshar berbai‟at untuk melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya. Hijrah Nabi Saw. ke Madinah pun dalam rangka membangun masyarakat dan pemerintahan yang Islami. Ketika Rasul saw wafat, kesibukan pertama para sahabat adalah pemilihan pemimpin bahkan mendahulukannya dari pemakaman Rasul (Munir, 2006)

Dengan adanya pemerintahan maka suatu negara maka dapat teratur sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan telah disepakati sehingga aturan-aturan tersebut dapat mengatur kehidupan masyarakat sehingga tidak melenceng dari aturan dan menjadi pengawas bagi masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma dari suatu pemerintahan.

Dalam Hidayatullah (2013) menjelaskan bahwa dalam perekonomian, pemerintah mempunyai peran sebagai:

a. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Ekonomi

   Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian,seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar; baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen (ahl al hisbah). Tim ini mengawasi instansi-instansi, pabrik-pabrik dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral.

b. Menghentikan Muamalah yang Diharamkan

   Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas islam, yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba dan penimbunan dan monopoli. Islam sangat memerhatikan perekonomian umat, oleh sebab itu islam menetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang, agar

tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal. Islam benar-benar melarang penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Terhadap kaum penimbun, negara diwajibkan untuk memeranginya dengan tegas dan keras, bahkan diperbolehkan mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya, lalu dijual kepada orang-orang yang memerlukannya dengan harga yang sedang dan pantas serta keuntungan yang wajar.

c. Pematokan Harga

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nash yang melarang pematokan harga. Namun adakalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil oleh rakyatnya.

Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah memiliki 3 fungsi penting dalam suatu perekonomian, yaitu: (Sumarni, 2013, p. 3)

a. Fungsi sebagai Stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan dalam ekonomi, politik, hukum dan keamanan.
b. Sebagai fungsi Alokasi. Menurut Sumarni (2013) kebijakan pemerintah sebagai pelaku perekonomian adalah sebagai fungsi alokasi yang berarti pemerintah sebagai penyedia barang-barang publik yang berguna untuk meningkatkan fasilitas publik.

Dengan adanya peningkatan fasilitas publik dan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah seperti: pembangunan jalan, saluran telpon dll. maka dapat meningkatkan tingkat efisiensi kerja yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memudahkan akses pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penetapan banyaknya barang yang disediakan oleh pemerintah untuk suatu tempat atau dapat diartikan sebagai penjatahan.

Sedangkan alokasi yang barang dalam meningkatkan ekonomi sendiri merupakan penetapan jatah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu kebijakan untuk menstabilkan harga, salah satunya Alokasi dalam program Operasi Pasar Murni (OPM).

Alokasi sebagai fungsi yang penting dalam menciptakan stabilisasi harga karena dengan tidak adanya alokasi yang baik yang dilakukan oleh pemerintah maka dapat menciptakan kegagalan dalam pasar *(market failure)*. Hal tersebut dapat terjadi karena sebuah pasar telah didominasi salah satunya oleh pemasok monopoli produksi sehingga menciptakan dampak sampingan (eksternalitas) dan menimbulkan rusaknya ekosistem lingkungan sekitar.

c. Fungsi Distribusi, yaitu sebagai pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Jadi, distribusi merupakan penyaluran baik barang maun jasa dari produsen ke konsumen.

   Menurut Berman dan Evans distribusi adalah semua bisnis dan orang yang terlibat dalam pergerakan fisik dan pemindahan pemilikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen (Dharmmesta, 2008, p. 2)

   Distribusi merupakan prinsip yang tepat sesuai dengan maksud dan tujuan mempermudah untuk memperoleh barang pada saat dibutuhkan. Sehingga konsumen sangat diutamakan dan persepsi pihak yang membutuhkan dan menginginkan merasa dipermudah dan dipercepat pemenuhan kebutuhan dan keinginannya.

Dilihat dari sudut pandang ini maka maksut memberikan kepuasan konsumen melalui distribusi ini dapat diperoleh gambaran kebijakan distribusi harus memenuhi kebutuhan sebagai berikut (Muslich, 2007) :

1. Ketepatan dan kecepatan waktu tiba ditangan konsumen
2. Keamanan yang terjaga dari kerusakan

Hal ini berbeda dengan sistem dalam ekonomi islam, yang sangat melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggungjawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Sistem ekonomi islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan (Qardhawi, 1997). Sebagaimana dalam QS. Adz Dzariyaat (51) ayat 19 yang berbunyi:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya disetiap harta kita terdapat hak-hak untuk orang miskin yang secara tidak langsung memerintahkan umat muslim untuk mendistribusikan hartanya untuk membantu sesama manusia guna mencukupi kebutuhan kaum yang membutuhkan.

Menurut Rahmawaty(2014), sistem distribusi dalam pandangan ekonomi islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam, diantaranya:

a. Kebebasan individu,

b. Adanya jaminan social,

c. Larangan menumpuk harta,

d. Distribusi kekayaan yang adil.

Qardhawi menjelaskan dalam Nofrianto (2009) mengenai distribusi dalam pandangan Ekonomi Islam didasarkan kepada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu :

a. Nilai Kebebasan

Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan adalah persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya, dan karena keyakinanya kepada manusia.Tauhid mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan alam semesta adalah berpusat pada Allah. Maka hanya kepada Allah saja setiap hamba melakukan pengabdian, Dia-lah yang menentukan rezki dan kehidupan manusia tanpa seorangpun bisa mengaturnya. Siapa saja yang mengatakan bahwa dia bisa memberikan rezki pada orang lain maka berarti orang tersebut telah sombong dan melanggar otoritas Tuhan. Sebagaimana dalam QS. Huud (11) ayat 6 yang berbunyi :

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى

كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ۝٦

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat

berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)"

Di samping itu, sistem Islam telah mengakui kebebasan karena Islam percaya kepada Allah dan juga percaya kepada manusia, percaya dengan fitrahnya yang telah Allah ciptakan kepadanya dan mempercayai kemuliaan dan kemampuan manusia yang membuatnya berhak menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi. Maka dalam pengelolaan dan sumber daya alam juga semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, termasuk dalam pendistribusian kekayaan dan pendapatan.

b. Nilai Keadilan

Sesungguhnya kebebasan yang disyari'atkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlan kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan.Tapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai "keadilan" yang diwajibkan oleh Allah. Hal itu karena tabiat manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan keberlangsungan hidup. Di antara tabi'at manusia yang lain adalah bahwa manusia senang mengumpulkan harta sehingga karena terlalu cintanya kadang-kadang keluar dari batas kewajaran. Sebagaimana telah diterangkan dalam QS. Al Hujurat (49) ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقْسِطُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٩

> *" .... Dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil"*
>
> Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syari'ah dan akhlak (moral). Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagaii potensi individu baik moral ataupun materil. Ia adalah tawazun antara individu dan komunitas, antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi yang benar adalah keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkakan hak dan melaksanakann kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam pendangan Islam distribusi merupakan hal vital dalam meningkatkan kemaslahatan umat. Dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan maka dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera khususnya masyarakat yang berada dibawah standar kemiskinan.

Distribusi merupakan tujuan dari operasi pasar. Dengan adanya distribusi yang baik dan benar maka masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya program Operasi Pasar yang dilakukan oleh pemerintah.

peran pemerintah dalam ekonomi juga bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam bidang perekonomian pasar salah satunya kegagalan pasar *(market failure)*. Hal tersebut terjadi jika terdapat kegagalan

dalam alokasi sumber daya yang dilakukan secara maksimal dan biasanya terjadi karena didominasi oleh pemasok monopoli baik produksi maupun konsumsi.

Peran pemerintah dalam ekonomi juga dapat berupa pemberian aturan-aturan seperti pemberian sanksi terhadapa para produsen yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai efisiensi pasar dan kestabilan harga pasar.

2. Konsep Stabilitas Harga dalam Pandangan Islam

Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga (Maisyarah et al., 2014)

Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatakan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Dalam undang-undang pangan ini dinyatakan bahwa sumber utama penyediaan pangan nasional berasal dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional (CPN). Bila dari kedua sumber tersebut tidak mencukupi, barulah dapat dipenuhi dari impor (Badan Ketahanan Pangan, 2017)

Stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.

Yusuf Qardhawi dalam Nuryadin (2007) menyatakan bahwa kestabilah suatu harga dipengaruhi oleh penentuan harga. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika dalam menentukan suatu harga dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap penjual/pedagang untuk menerima harga

yang tidak mereka sepakati, maka dalam hal ini tidak dibenarkan oleh syariat islam. Hal tersebut sama halnya dengan mengurangi takaran/timbangan karena hakekatnya sama dengan merugikan pihak satu dengan pihak lainnya dan tidak sesuai dengan syariat islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al Muthaffifiin (83) ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

"1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Namun, jika dalam penentuan suatu harga tersebut untuk menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan harga diatas harga resmi, ka hal tersebut diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Menurut Qardhawi, jika pedagang menimbun/menahan suatu barang, sementar konsumen membutuhkannya dengan maksut agar pembeli mau membeli dengan harga dua kali lipat dari harga awal. Maka dalam perkara ini pihak pemerintah wajib menetapkan harga tersebut supaya pedagang menjual dengan harga yang sesuai demi terciptanya suatu keadilan sebagai mana diminta oleh Allah (Nuryadin, 2007)

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi dalam mencapai kestabilan suatu harga maka dipengaruhi oleh penentuan suatu harga. Harga tersebut ditetap oleh pemerintah guna mencapai kemaslahatan umat. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, maka pedagang yang melakukan penimbunan tidak akan mendapatkan keuntungan karena hak tersebut tidak sesuai dengan undang-undang maupun syariat islam.

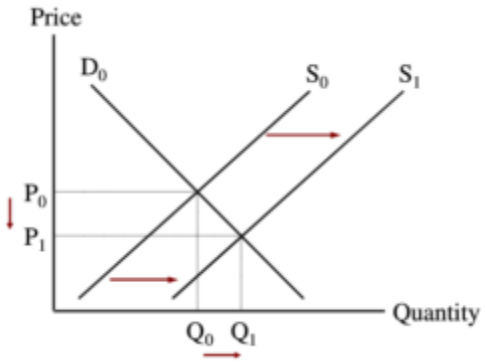
Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah dalam Karim (2003) untuk mencapai suatu kestabilan suatu harga maka dalam penentuan harga adalah permintaan produk/jasa dan pemasaran produk/jasa, dalam permintaan yang banyak disebut permintaan pasar sedangkan dalam penawaran tidak dilarang dalam islam selama tidak berlakuk zalim terhadap konsumen.

Permintaan pasar dan penawaran akan barang merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu kestabilan suatu harga. Titik keseimbangan merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen dimana kedua pihak saling ridha satu dengan yang lain.

3. Keseimbangan Pasar

Harga keseimbangan atau harga pasar adalah tinggi rendahnya dengan tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen/penawaran dengan konsumen atau permintaan (Purwanta, 2000)

Hukum keseimbangan pasar menyatakan bahwa peningkatan penawaran akan menyebabkan menurunnya keseimbangan harga dan meningkatkan jumlah atau kuantitas (Maisyarah et al., 2014)



Gambar 1.1 Hukum Keseimbangan Pasar
Sumber : (Jurnal Model Penentuan Operasi Pasar Untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah)

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut, untuk menurunkan harga (*Price)* dari barang dan jasa tersebut maka dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah (*Quantity)* penawaran.

Jika harga dari suatu komoditas mengalami kenaikan dengan faktor lain tidak berubah maka akan mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah komoditas akan menurun maka akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah komoditas yang ditawarkan (Nuryanti, 2005)

Faktor yang memperngaruhi keseimbangan pasar :

c. Permintaan barang dan jasa bertambah,
d. Tinggi dan rendahnya biaya suatu produksi,
e. Pandangan terhadap masa depan baik produsen maupun konsumen,
f. Selera konsumen.

4. Mekanisme Pasar dalam Pandangan Islam

a. Masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin

Pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat muslim. Pada masa Rasulullah SAW beliau menolak untuk mebuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga pada saat di Madinah saaat itu mengalami kenaikan harga karena banyaknya permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan monopolistik dan monopsonistik (Hakim, 2015)

Dalam pandangan mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrayidin tidak ada seorangpun baik secara individu dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar sendiri merupakan kekuatan yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.

b. Menurut Abu Yusuf (731-798)

Dalam padangan Abu Yusuf pada Hakim (2015) tentang mekanisme pasar harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga murah. Ia menentang penguasa yang menetapkan harga, dengan berpegang pada Hadis Rasulullah SAW. Di mana, para penguasa pada masa itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Padahal kecenderungan dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran.

c. Menurut Ibnu Taimiyah (1258 M)

Pandangan Ibn Taimiyah dalam Hakim (2015) mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan keindahan mekanisme pasar di samping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari pedagang atau penjual, sebagaimana banyak orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor

yang kompleks. mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurun jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar.

5. Operasi Pasar Murni

Operasi pasar adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani lonjakan harga yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu (Maisyarah et al., 2014). Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga barang komoditas dengan cara pemotongan harga sekitar 10%-15% dibawah harga pasar (Hessie, 2009)

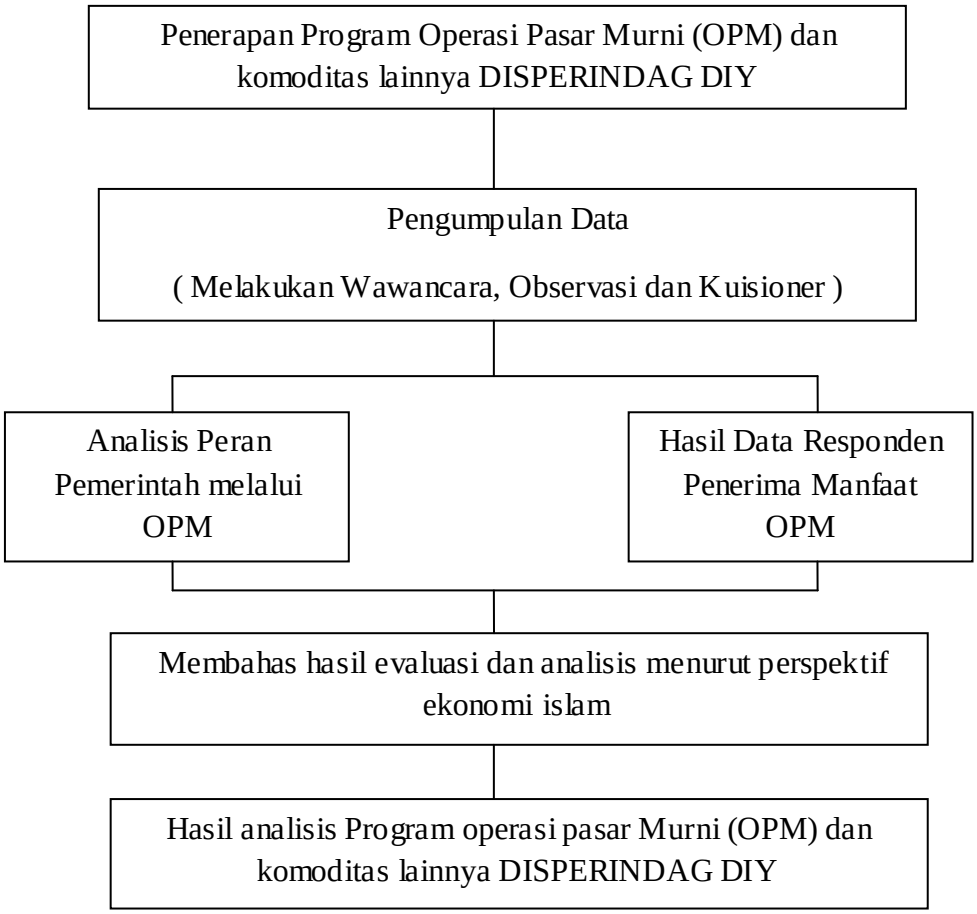
Operasi pasar dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi konsumen karena harga barang yang berlaku di pasar disarankan sangat tinggi. Ketika harga bahan pokok di pasar terlalu tinggi, maka pemerintah melewati suatu lembaga yang bersangkutan menambahkan jumlah penawaran atau pasokan bahan pokok, sehingga harga bahan pokok dapat normal kembali.

Operasi Pasar Murni (OPM) beras merupakan salah satu program pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas khususnya beras. Dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) biasanya bekerjasama dengan Perum BULOG Divre setempat dan perangkat desa setempat dimana akan dilakukan operasi pasar tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan *sintesa* dari berbagai teori-teori yang telah dijelaskan yang tertuang dalam telaah pustaka dan landasan teori.

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang mejadi objek suatu permasalahan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Peran pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif guna menggambarkan situasi dan fenomena untuk mendapatkan informasi saat ini yang akurat (Maolani, 2015) melalui observasi, wawancara, dan sumber data sekunder.

Dan kemudian didukung dengan metode kuantitatif guna menguatkan data kualitatif. Menurut Sugiyono, metode kualitatif sama dengan metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2012)

B. Lokasi Penelitian

Dalam lokasi penelitian ini bertempat di DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY yang beralamat di Jl. Kusumanegara No. 9, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 55165. Waktu penelitian tersebut dimulai pada hari Minggu, 1 April 2018 sampai Rabu, 2 Mei 2018.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kedung Keris, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, DIY yaitu kalangan menengah kebawah yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sample* . Oleh karena itu, penulis menggunakan sampel yaitu sejumlah 30 orang yang pernah ikut

berpartisipasi dalam program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY.

Dalam teknik sampling tersebut dengan berdasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu:

a. Masyarakat yang dianggap kurang mampu

   Kategori masyarakat kurang mampu desa Kedung Keris adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani dan berstatus janda (Wawancara dengan Wahyu Y., 12 September 2018)

b. masyarakat yang mendapatkan kupon.

Karena pertimbangan tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh masyarakat untuk diperbolehkan mengikuti Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

D. Sumber Data

a. Data Primer

   Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari(Saifuddin A., 2010). Maksud dari data primer ini adalah data yang di peroleh langsung dari sumber asli, dalam penelitian ini adalah hasil jawaban wawancara peneliti kepada narasumberdari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

b. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau sudah tersedia dan kita sudah bias mengambilnya yang kemudia mengolahnya. Data sekunder penelitian ini bias kita peroleh melalui proses olah data keuanagn, wawancara dan dokumentasi, informasi yang di dapat berupa dambaran umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Wawancara

   Wawancara (interview) adalah Tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam kontek ini berarti proses memperoleh suatu fakata atau data dengan melakukan komunikasi langsung (Tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitiaan, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh) (Supardi, 2015) dalam wawancara ini melibatkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (DISPERINDAG DIY) terkait pelaksana program Operasi Pasar Murni (OPM) atau pihak yang terkait.

2. Observasi

   Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nawawi dan Martini mengungkapkan bahwa observasi merupakan pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematik mengenai unsur-unsur yang muncul dalam suatu permasalahan atau segala bentuk gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tercatat secara terstruktur dan sistematis mengikuti aturan yang sah sebelumnya.

   Sedangkan menurut Prof. Heru, observasi adalah studi yang dilakukan secara sistematis dan terarah sertatelah direncanakan pada tujuan tertentu dengan mengamati dan mencatat kejadin-kejadian yang terjadi dalam suatu kelompok orang dengan mengacu pada syarat-syarat dan aturan penelitian ilmiah. Dalam suatu karya tulis ilmiah, penjelasan yang

diutarakan harus tepat, akurat, dan teliti, tidak boleh dibuat-buat sesuai keinginan hati penulis.

Dalam hal ini observasi dilakukan kepada pembeli atau konsumen yang mengikuti program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagang DIY (DISPERINDAG DIY).

3. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan, yaitu salah satu cara untuk memperoleh data dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Dokumentasi

   Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari hasil publikasi lembaga-lembaga atau instansi pemerintah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (DISPERINDAG DIY)

5. Kuisioner

   Kuisioner merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari tingkah laku, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa masyarakati yang bisa memperngaruhi sistem yang diajukan atau sistem yang telah ada.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain (Moeleng, 2002, pp. 13-104). Miles dan Hubberman mengemukakan beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data antara lain (Sugiyono, 2014):

a. Reduksi data

   Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiono,2013)

G. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
Peran Pemerintah	Dengan adanya pemerintahan mana suatu negara maka dapat teratur sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan telah disepakati sehingga aturan-aturan tersebut dapat mengatur kehidupan masyarakat sehingga tidak	Menurut Hidayatullah (2013) peran pemerintah dalam perekonomian islam terbagi menjadi 3yaitu: menjadi faktor penggerak ekonomi, mengehentikan	(Hidayatullah,2013) 1. Penggerak Ekonomi 2. Menghentikan Muamalah yang Diharamkan 3. Mematok Harga jika dibutuhkan. (Sumarni,2013,p.3) 1. Stabilisasi

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
	melenceng dari aturan dan menjadi pengawas bagi masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma dari suatu pemerintahan.	muamalah yang diharamkan dan mematok harga jika dibutuhkan. Menurut Sumarni (2013., p. 3) sebagai pelaku ekonomi, peran pemerintah mempunyai fungsi sebagai Stabilisasi, Alokasi dan Distribusi.	2. Alokasi 3. Distribusi
Stabilisasi Harga	Menurut Maisyarah et.al (2014) Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi	Yusuf Qardhawi dalam Nuryadin (2007) menyatakan bahwa kestabilah suatu harga dipengaruhi oleh penentuan harga. Selanjutnya Qardhawi menyatakan	1. Penetapan Harga 2. Kesepakatan Harga

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
	perkembangan harga.	bahwa jika dalam menentukan suatu harga dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap penjual/pedagang untuk menerima harga yang tidak mereka sepakati, maka dalam hal ini tidak dibenarkan oleh syariat islam.	
Operasi Pasar Murni (OPM)	Menurut Maisyarah et al., (2014)Operasi pasar adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani lonjakan harga yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu.	Menurut (Hessie, 2009) Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga barang komoditas dengan cara pemotongan harga sekitar	Pemotongan harga sekitar 10%-15% dibawah harga pasar

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
		10%-15% dibawah harga pasar.	

H. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri memposisikan sebagai instrument atau alat ukur penelitian. Penelitian sebagai *Human Instrument*, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, melalui kualitas data dan membuat kesimpulan atas keseluruhan data (Sugiono, 2013) kemudian data tersebut didukung dengan data yang dicari menggunakan metode kuantitatif sehingga menguatkan data sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai validasi mengenai bagaimana Program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini terdapat beberapa instrument yang dibuat, yaitu melalui wawancara mengenai upaya pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga untuk masyarakat yang dilakukan terhadap pihak DISPERINDAG DIY meliputi peran pemerintah sebagai penggerak ekonomi, menghentikan muamalah yang diharamkan dan sebagai pematok harga saat dibutuhkan serta Distribusi, Alokasi dan Stabilisasi Harga. Serta melakukan observasi tentang program pemerintah dalam menstabilkan harga salah satunya program Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya serta melakukan pendukungan data melalui kuisioner terhadap masyarakat yang menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) secara langsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penyusun akan menjelaskan pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menekankan pada proses penyimpulan induktid serta analisis terhadap hunungan antara fenomena yang diamati. Sehingga dapat menghasilkan pembahsan yang dapat menjawab rumusan permasalahan pada penelitian ini. sedangkan data yang masih mentah berupa data wawancara dan observasi akan disajikan pada halaman lampiran.

Dalam bab pembahasan ini penulis menggunakan data wawancara yang telah tercantum pada halaman lampiran yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun subjek yang dimaksut dalam penulis ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (DISPERINDAG DIY)

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang terletak di Jalan Kusumanegara No. 9 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kantor cabang yang berada di Yogyakarta. kantor ini memiliki tugas tugas mengelola Aset Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan milik negara di Yogyakartadan sekitarnya.

Didalam Organisasi yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terdapat beberapa Bidang yang mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, salah satunya adalah Bidang Dalam Negeri/Dagri. Dalam bidang tersebut mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

Tabel 4.1 Struktur Organisasi DISPERINDAG Bidang Dalam Negeri

NO	JABATAN	NAMA	ANGGOTA
1	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Yuna Pancawati, SE. MSi	
2	Kepala Sie Pengadaan dan Penyaluran	Ir. Guntur Wahyu A. (Gol. IV/a)	Ibu Umi Bapak Arya Bapak Tugiran Baiq Novia
3	Kepala Sie Pengawasan Perdagangan	Yanto Apriyanto, SH (Gol. III/d)	Ibu Debora Ari Kristinawati Ibu Sri Haryanti Ibu Parni
…	Kepala Sie Sarana dan Usaha Perdagangan	Edi Harsono, SE	Bapak Tupar Bapak Bowo Ibu Sriyati

Sumber : (Kantor DISPERINDAG DIY Bagian Program)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai Visi yang sama dengan Visi dan Misi Gubernur (2017-2022) yaitu Menyongsong "Abad Samudra Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Serta memiliki Lima Misi, yakni:

1. Terwujudnya peningkatan hidup-penghidupan-kehidupan masyarakat dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
2. Terwujudnya peningkatan dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi pada sumberdaya lokal (keunikan

teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkupbirokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan dan demokratis.
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para apatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani masa lalu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. Analisis Peran Pemerintah dalam Penyediaan Barang Komoditas melalui Operasi Pasar Murni (OPM) DISPERINDAG DIY

1. Analisis Peran Pemerintah

Peran pemerintah merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah. Dalam hal perekonomian menurut Hidayatullah (2013), peran pemerintah meliputi 3 hal:

a. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya DISPERINDAG DIY mempunyai tugas sebagai pengawas pasar dan sebagai pemantau harga khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. berbagai cara dilakukan DISPERINDAG DIY dalam mengawasi pasar salah satunya melakukan sidak yang dilakukan di 3 pasar berbeda yaitu Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan dan Pasar Demangan selain melakukan sidak, DISPERINDAG DIY melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) untuk menciptakan perekonomian yang stabil

sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi (Wawancara dengan Guntur Wahyu,31 Maret 2018)

Dengan adanya sidak di 3 pasar berbeda dan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY maka hal tersebut sebagai salah satu bentuk pengawasan harga yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang perekonomian untuk menciptakan kemaslahatan umat.

b. Menghentikan Muamalah yang Diharamkan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakuakan oleh DISPERINDAG DIY merupakan penerapan untuk menanggulangi dampak dari adanya inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga pada saat memasuki hari-hari besar seperti Natal dan Idul Fitri dan mencegah adanya kenaikan harga akibat penimbunan harga yang dilakukan oleh produsen lain (Wawancara dengan Yuna Pancawati,20 Maret 2018)

Dengan adanya Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY maka haltersebut sebagai program kegiatan yang mengehentikan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah salah satunya penimbunan barang yang mengakibatkan kenaikan harga yang berdampak pada kesulitan masyarakat yang hidup dibawah standar kemiskinan untuk mendapatkan barang komoditas tersebut.

c. Mematok Harga

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY merupakan kegiatan dengan cara pemotongan harga dengan memberikan subsidi dan injeksi ditempat atau lokasi yang membutuhkan. Dengan adanya subsidi yang dilakukan maka harga yang ditawarkan pada pada saat dilakukan Operasi Pasar Murni (OPM) lebih terjangkau dari harga pasar sehingga

masyarakat miskin penerima manfaat OPM dapat mendapatkan manfaat tersebut lebih maksimal.

d. Alokasi Barang

Alokasi barang merupakan salah satu aspek penting untuk mengetahui berhasil atau tidaknya program Operasi Pasar Murni (OPM) dari pemerintah. Dengan adanya alokasi yang baik maka kebutuhan barang komoditas masyarakat dapat tercukupi secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya Operasi Pasar Murni (OPM) dan Komoditas lainnya dalam penyediaan barang komoditas dapat terserap habis oleh masyarakat setempat yang membutuhkan (Wawancara dengan Yuna Pancawati,20 Maret 2018)

Dalam hal ini, pihak disperindag telah menyiapkan barang komoditas yang berkisar antara 150-200 paket yang selanjutnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Hal tersebut kurang sesuai dengan pemikiran Sumarni (2013) jika dikaitkan dengan program Operasi Pasar Murni mengenai peran pemerintah dalam ekonomi salah satunya adalah alokasi yaitu pengadaan barang seperti pembuatan jalan, jaringan telepon. Sedangkan alokasi yang sesuai dengan Operasi Pasar Murni (OPM) adalah mengenai alokasi barang yang akan didistribusikan yang selanjutnya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

e. Distribusi Barang

Distribusi merupakan prinsip yang tepat sesuai dengan maksud dan tujuan mempermudah untuk memperoleh barang pada saat dibutuhkan. Sehingga konsumen sangat diutamakan dan persepsi pihak yang membutuhkan dan menginginkan merasa dipermudah dan dipercepat pemenuhan kebutuhan dan keinginannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang lah dilakukan bahwasannya dalam melakukan analisis mengani konsep distribusi kita harus melihat 2 konsep utama, yaitu:

(1) Ketepatan dan Kecepatan Waktu Tiba Ditangan Konsumen

Dalam melakukan distribusi barang komoditas lewat program Operasi Pasar Murni (OPM) dan Komoditas Lainnya, pihak DISPERINDAG DIY sebelumnya melakukan survey tempat/lokasi sebelum dilakukan Operasi Pasar tersebut. Dalam hal ketepatan, pihak DISPERINDAG DIY menentukan ketentuan yang bersifat wajib bagi masyarakat yaitu: masyarakat yang berada dibawah garis standard kemiskinan dan mendapatkan kupun yang jumlahnya terbatas. Dengan adanya ketentuan tersebut maka DISPERINDAG DIY dalam program Operasi Pasar Murni (OPM) dan Komoditas Lainnya telah mengkhususkan target Operasi Pasar sehingga tepat sasaran dan tidak melenceng dari tujuan (Wawancara dengan Yuna Pancawati,20 Maret 2018)

Dalam hal kecepatan waktu tiba ditangan konsumen, pihak DISPERINDAG DIY selalu melakukan operasi pasar dalam jangka 1 sampai 2 bulan sebelum harga barang-barang komoditas melonjak seperti dengan adanya Hari-hari Natal, Tahun Baru dan Idul Fitri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan antisipasi supaya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dapat merasakan manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) dan barang komoditas lainnya (Wawancara dengan Guntur Wahyu,31 Maret 2018)

(2) Keamanan yang terjaga dari kerusakan

Keamanan atau keselamatan barang Operasi Pasar merupakan suatu yang penting disaat melakukan program tersebut agar

selamat sampai ditangan konsumen. Dalam hal ini DISPERINDAG DIY melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia, sagas Pangan DIY dan pihak Distributor Bahan Pokok yang bermanfaat apabila terdapat barang komoditas yang rusak sebelum sampai ditangan konsumen maka, barang tersebut dapat langsung ditukarkan dengan yang baru karena pihak Distributor Bahan Pokok selalu membawa cadangan barang sebagai antisipasi kerusakan (Wawancara dengan Guntur Wahyu,31 Maret 2018)

Keamanan barang yang diterapkan oleh pihak DISPERINDAG DIY telah mencerminkan sifat amanah. Amanah dalam artian dapat dipercaya sebagai aparat pemerintah yang mengemban tugas untuk mendistribusikan barang kebutuhan seluruh masyarakat yang membutuhkan dan prasejahtera dalam program Operasi Pasar. Selain itu merupakan kewajiban atau tugas bagi DISPERINDAG DIY untuk menstabilkan harga dengan cara distribusi yang baik.

f. Stabilisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasannya untuk menjaga stabilisasi harga, pihak DISPERINDAG DIY melakukan beberapa kegiatan antara lain sidak di 3 pasar yaitu pasar Beringharjo Kranggan dan Demangan untuk mengetahui harga yang telah ditetapkan apakah telah sesuai atau tidak dan melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan untuk menanggulangi kenaikan harga sebelum memasuki hari-hari besar seperti Natal dan Idul Fitri apabila dengan adanya kegiatan tersebut harga tidak kunjung stabil maka pihak DISPERINDAG DIY melakukan impor barang yang sebelumnya harus mendapatkan persetujuan pihak kementrian perdagangan (Wawancara dengan Guntur Wahyu,31 Maret 2018)

Dalam hal ini pihak DISPERINDAG DIY menerapkan berbagai program untuk menciptakan stabilisasi harga supaya masyarakat dalam mendapatkan barang komoditas menjadi lebih terjangkau dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

2. Analisis Praktik Stabilisasi Harga melalui OPM DISPERINDAG DIY

Badan Ketahanan Pangan mengemukakan dalam pengelolaan stabilisasi harga yang dilakukan merupakan kewajiban sesuai dengan UU No 18 tahun 2012 tentang pangan. Dalam undang-undang ini telah dijelaskan bahwa sumber utama penyediaan barang pangan berasal produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional (CPN), bila dari kedua sumber tersebut tidak mencukupi maka barulah dapat dipenuhi dalam impor.

DISPERINDAG DIY dalam melakukan stabilisasi harga menggunakan 2 cara, salah satunya dengan Operasi Pasar Murni (OPM) dan barang komoditas lainnya. berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasannya DISPERINDAG juga akan melakukan Impor barang apabila dengan cara Operasi Pasar tidak menjamin terjadinya stabilisasi harga dikalangan masyarakat maka pihak DISPERINDAG DIY dapat melakukan Impor barang dengan bekerjasama dengan Kementrian Perdagangan. Dalam melakukan Operasi Pasar Murni, DISPERINDAG DIY melakukan penetapan harga barang komoditas yang ditetapkan dibawah harga pasar sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap dapat mengkonsumsi barang komoditas tersebut dengan tujuan menciptakan kestabilan harga dan mengurangi inflasi. (Wawancara dengan Yuna Pancawati,20 Maret 2018)

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yususf Qardhawi dalam mencapai suatu kestabilan harga dengan cara penetapan suatu harga. Bahwa kestabilah suatu harga dipengaruhi oleh penentuan harga. Selanjutnya Qardhawi menyatakan jika dalam penentuan suatu harga tersebut untuk

menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan harga dibawah harga resmi. Maka hal tersebut diperbolehkan dan wajib diterapkan. Dalam perkara ini pihak pemerintah wajib menetapkan harga tersebut supaya pedagang menjual dengan harga yang sesuai demi terciptanya suatu keadilan sebagai mana diminta oleh Allah.

3. Analisis Operasi Pasar Murni (OPM) dan Komoditas di DISPERINDAG DIY

Dalam Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menstabilkan harga barang komoditas dimasyarakat dengan cara pemotongan harga barang komoditas sekitar 10%-15% dibawah harga pasar.

Tabel 4.2 Daftar Harga OPM Kedung Keris

NO	JENIS KOMODITI	HARGA PASAR	SUBSIDI BIAYA PENGIRIMAN	HARGA JUAL
1	Bawang Putih (1kg)	Rp. 55.000	Rp. 14.000	Rp. 24.000
2	Minyak Goreng (1kg)	Rp. 12.000	Rp. 4.000	Rp. 7.000
3	Telur Ayam (1kg)	Rp. 23.000	Rp. 6.000	Rp. 17.000
TOTAL		Rp. 90.000	Rp. 24.000	Rp. 48.000

Sumber : (Kupon OPM DIPERINDAG DIY di Desa Kedung Keris, 2017)

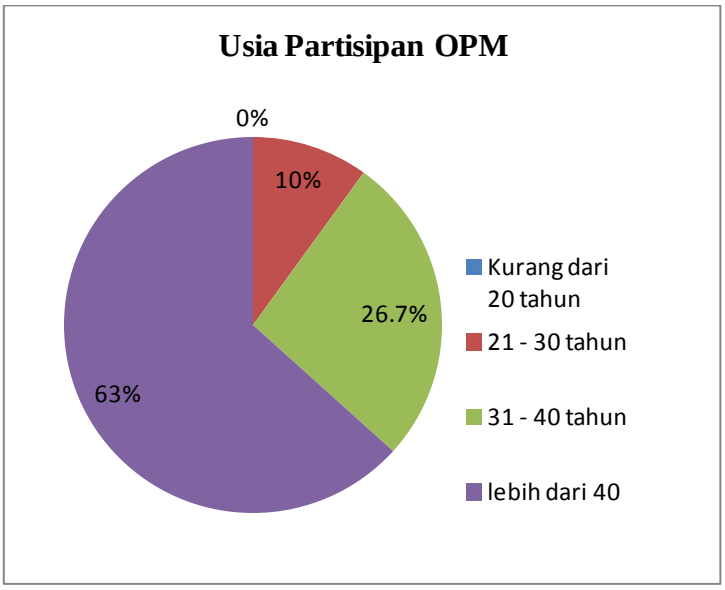
Sesuai dengan data yang didapat jika dibandingkan dengan indikator dalam Operasi Pasar maka dapat diketahui bahwa Operasi Pasar yang

dilakukan oleh DISPERINDAG DIY dalam pemotongan harga barang tersebut sebesar 47% sehingga dengan pemotongan harga barang hingga mencapai 47% maka dapat disimpulkan bahwa penurunan tersebut sangat besar sehingga masyarakat kurang mampu dan pra sejahtera dapat menikmati barang komoditas tersebut.

Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan olehHessie(2009)Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga barang komoditas dengan cara pemotongan harga sekitar 10%-15% dibawah harga pasar.Dengan adanya pemotongan yang mencapai 47% dari harga normal, maka dapat disimpulkan bahwa program Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan indikator yang telah ada yaitu pemotongan harga antara 10%-15% bahkan jika lebih besar lagi maka harga barang kebutuhan masyarakat semakin murah dan semakin terjangkau.

C. Hasil Data Karakteristik Responden Penerima Manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) DISPERINDAG DIY

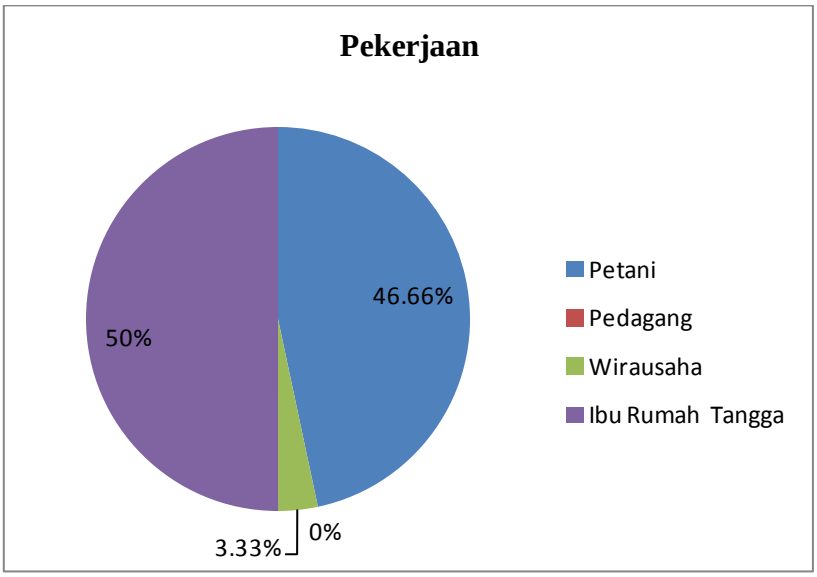
Berdasarkan hasil kuisioner yang telah diambil dengan sampel 30 masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY yang terletak di Kecamatan Nglipar, Desa Kedung Keris, Gunung Kidul, DIY diketahui bahwa :



Gambar 4.1 Bagan Usia Partisipan OPM Kedung Keris

Dari gambar 4.1 diatas diketahui bahwa 63,33% usia masyarakat DesaKedung Keris, kecamatan Nglipar, Gunung Kidul, DIY pada saat dilakukannya Operasi Pasar Murni (OPM) berumur lebih dari 40 tahun yaitu berjumlah 19 dari 30 orang. sedangkan 26,66% atau 8 partisipan dari 30 sampel yang dilakukan berumur antara 31 - 40 tahun, dan10% atau 3 partisipan dari total 30 sampel yang telah dilakukan berumur 21 – 30 tahun serta 0% atau 0 partisipan yang berumur kurang dari 20 tahun.

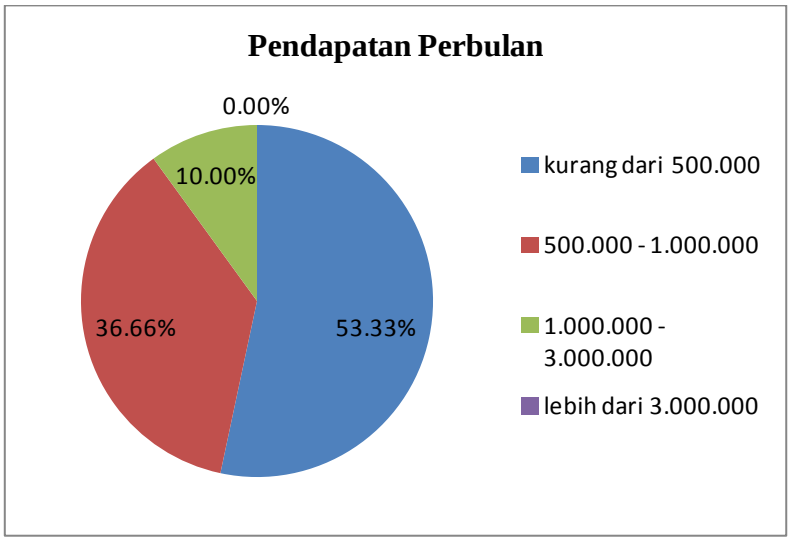
Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kedung Keris yang menjadi partisipan dalam Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lain yang pernah dilakukan oleh DISPERINDAG DIY berumur lebih dari 40 tahun.



Gambar 4.2 Bagan Pekerjaan Partisipan OPM

Dari gambar 4.1 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas pekerjaan partisipan Operasi Pasar Murni (OPM) masyarakat Desa Kedung Keris, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, DIY adalah seorang petani dengan berjumlah 50% orang atau 15 dari 30 orang sampel yang telah dilakukan. Dan 46,66% atau 14 orang dari total 30 sampel adalah seorang ibu rumah tangga, serta 3,33% atau 1 orang pekerjaan masyarakat adalah seorang wirausaha.

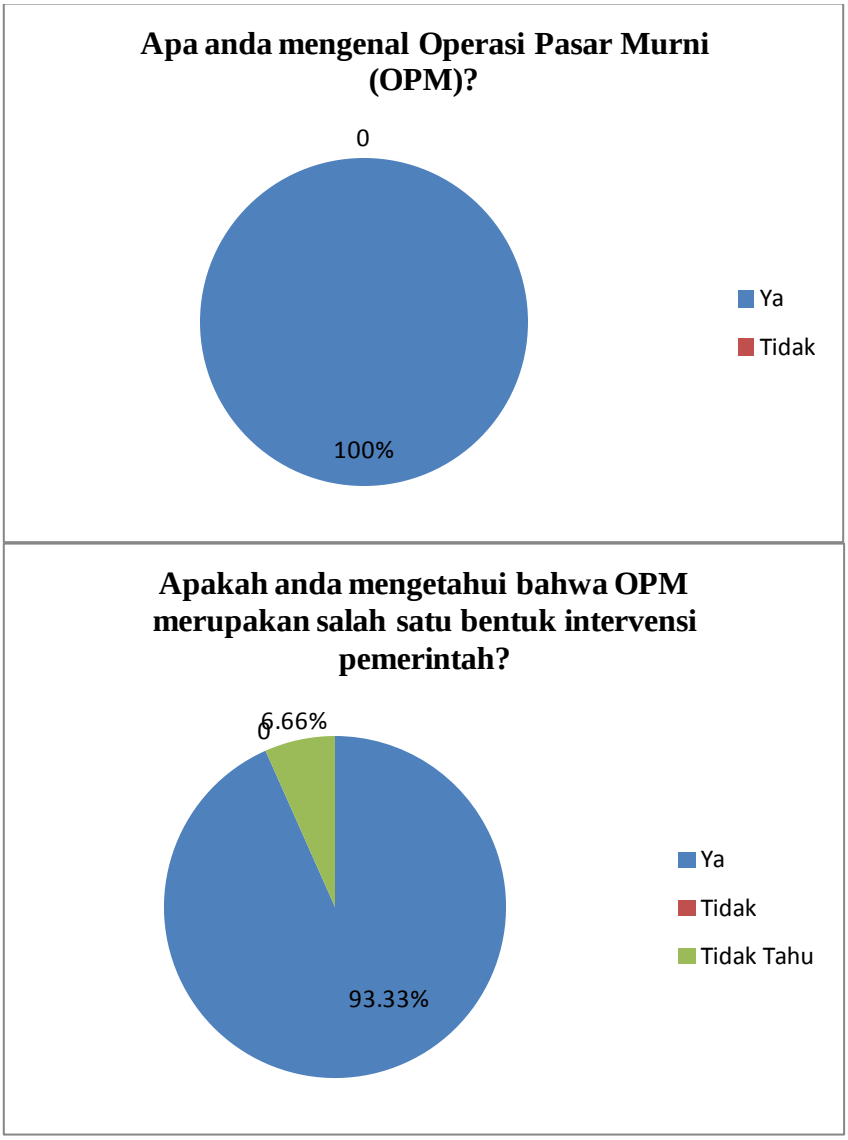
Hal ini dapat diketahui bahwa mayoritas pekerjaan penduduk Desa Kedung Keris yang memperoleh manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) adalah seorang petani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, disisi lain partisipan yang hampir mendominasi adalah Ibu rumah tangga yang mencapai 46,66% ibu rumah tangga menjadi sasaran dari manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) karena dianggap tidak mampu salah satunya adalah kategori janda.



Gambar 4.3 Bagan Pendapatan perbulanpenerima manfaat OPM

Dari gambar 4.3 yang telah didapat mengenai pendapatan masyarakat penerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) Desa Kedung Keris, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, DIY perbulanmayoritas kurang dari Rp. 500.00 rupiah perbulan dengan sebesar 53,33% orang atau sebanyak 16 dari total 30 orang. Dan sebanyak 36,66% pendapatan masyarakat penerima manfaat OPM perbulan antara Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 rupiah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan data BPS (2018) rata-rata pendapatan masyarakat miskin antara Rp. 401.000 perbulan. Dan 10% atau 3 dari 30 orang masyarakat berpendapatan Rp. 1.000.000 hingga Rp 3.000.000 perbulan.

4. Analisis Peran Pemerintah

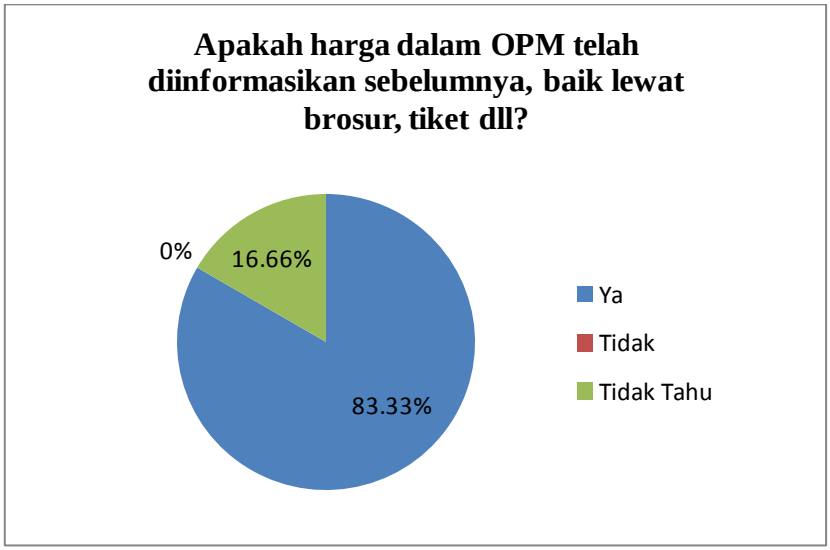


Gambar 4.4Bagan Pengenalan OPM terhadap Masyarakat

Dari gambar 4.4 sampel yang telah didapat bahwa sebanyak 100% atau 30 orang dari 30 masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) dari pemerintah mengetahui bahwa terdapat kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang pernah dilakukan oleh pemerintah di Desa Kedung Keris, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, DIY.

Dari 30 masyarakat tersebut, terdapat 28 orang atau sebanyak 93,33% masyarakat mengetahui bahwa Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah. 2 dari 30 orang atau 6,66% orang tidak mengetahui bahwa Operasi Pasar Murni merupakan salah satu kebijakan pemerintah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang berpartisipasi mengetahui bahwa terdapat kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah dan mengetahui bahwa kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan salah satu bentuk dari intervensi/ kontribusi oleh pemerintah.

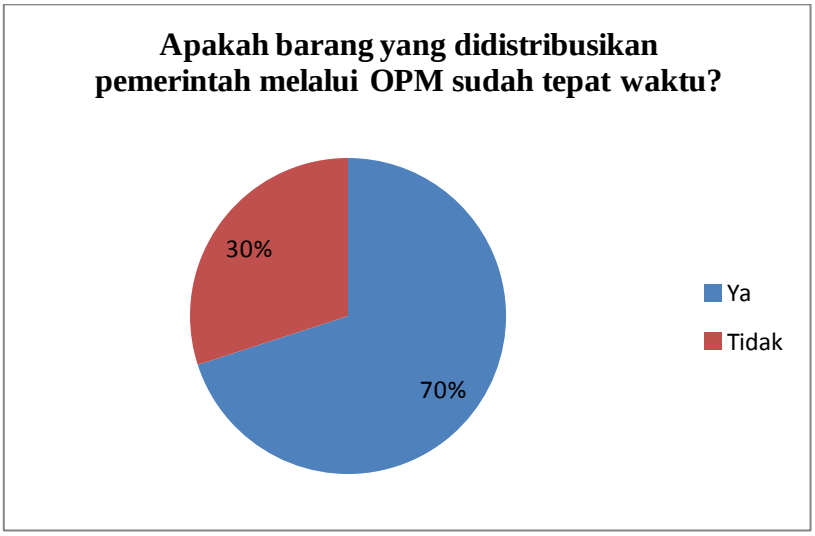


Gambar 4.5 Bagan Informasi tentang adanya OPM

Dari gambar 4.5 sampel diatas diketahui bahwa 83,33% orang atau 25 dari 30 partisipan Operasi Pasar Murni (OPM) mengetahui bahwa sebelum dilakukannya OPM masyarakat telah mengetahui harga barang yang besok akan ditawarkan ketika OPM dari pemerintah berlangsung. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh pihak DISPERINDAG DIY berkenaan dengan informasi bahwasanya sebelum dilaksanakannya OPM

masyarakat diinformasikan terlebih dahulu apabila akan diadakannya Operasi Pasar Murni dengan penyebaran brosur harga kepada masyarakat yang dituju. Sedangkan 16,66% orang atau 5 dari 30 orang tidak mengetahui harga-harga sebelum OPM berlangsung.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kedung Keris yang akan menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) telah mengetahui harga dan jenis barang yang akan dibagikan sebelum dilakukannya Operasi Pasar Murni (OPM) oleh pemerintah, baik lewat brosur ataupunkupon.



Gambar 4.6 Bagan ketepatan waktu dilaksanakannya OPM

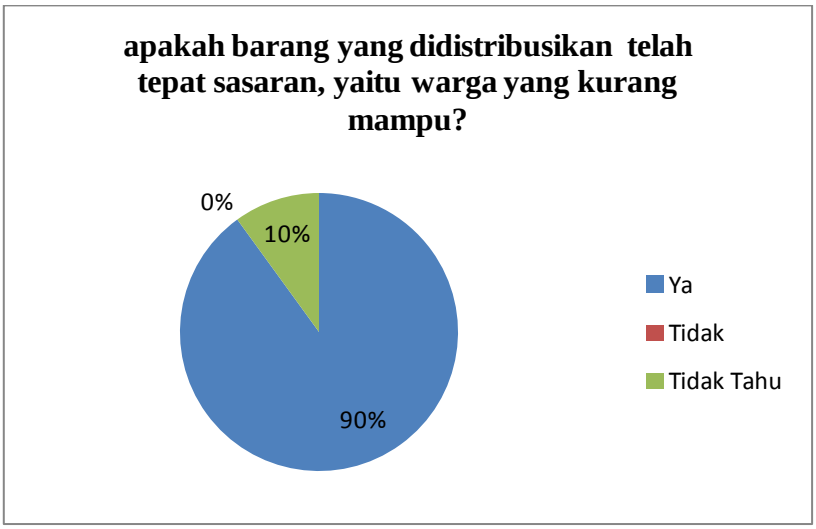
Dari gambar 4.6 sampel diatas diketahui bahwa 70% masyarakat atau 21 dari 30 orang yang telah berpartisipasi dalam Operasi Pasar Murni (OPM) dari pemerintah mengetahui bahwa Operasi Pasar Murni (OPM) dilaksanakan secara tepat waktu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara mengenai distribusi yang tepat waktu yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY bahwasanya Operasi Pasar Murni (OPM) dilakukan 1 – 2 bulan sebelum memasuki hari-hari ketika harga melonjak salah satunya karena Idul Fitri dan Natal. Selain itu

30% atau sebanyak 9 dari 30 orang tidak mengetahui apakah Operasi Pasar Murni yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat waktu atau tidak.



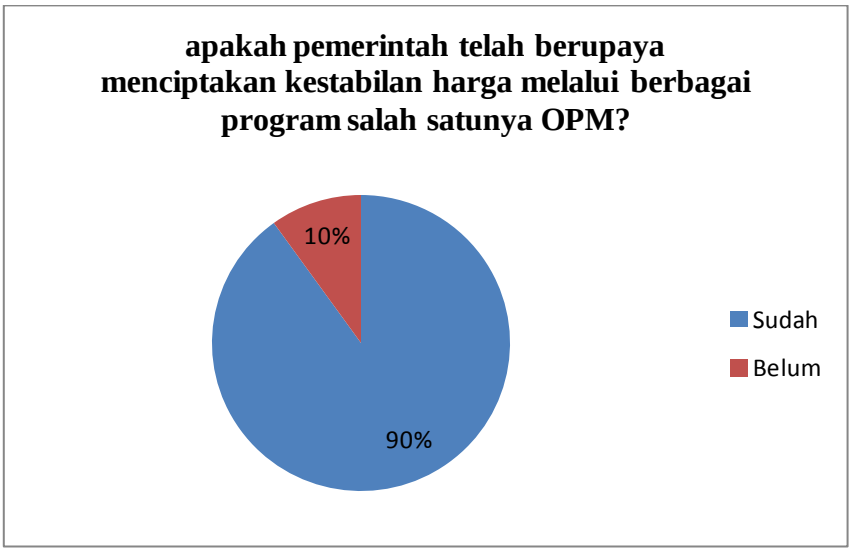
Gambar 4.7 Bagan keadaan barang OPM setelah diterima masyarakat

Dari dari gambar 4.7 hasil sampel diatas diketahui bahwa 100% atau 30 dari 30 orang partisipan yang telah mengikuti program Operasi Pasar Murni (OPM) menerima barang dari program tersebut dalam keadaan baik. hal tersebut sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan bahwasanya jika terdapat barang yang rusak sebelum diterima oleh penerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah maka akan digantikan dengan yang baru. Karena pada program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan tersebut, pemerintah bekerjasama dengan pihak distributor barang sehingga apabila barang tersebut rusak sebelum sampai ketangan penerima manfaat OPM maka barang tersebut dapat digantikan dengan barang yang baru.



Gambar 4.8 Bagan sasaran kegiatan OPM

Dari gambar 4.8 tersebut dapat diketahui bahwa 90% atau 27 dari 30 partisipan yang telah mengikuti kegiatan OPM mengetahui bahwa yang dapat mengikuti program OPM adalah masyarakat yang berada dalam standar garis kemiskinan. berdasarkan Rohmat Y. selaku ketua RW Desa Kedung Keris dalam hal ini mayoritas sasaran dari kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) di Desa Kedung Keris adalah yang berstatus seorang janda dan seorang petani karena warga tersebut lebih layak mendapatkan manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan tujuan dari adanya Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah yaitu masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan 10% atau 3 dari 30 orang tidak mengetahui sasaran dari OPM dari pemerintah.



Gambar 4.9 Bagan OPM sebagai program kestabilan Harga

Dari gambar 4.9 diatas diketahui bahwa 90% atau 27 dari 30 orang partisipan yang telah mengikuti Operasi Pasar Murni (OPM) mengetahui bahwa Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan salah satu cara pemerintah untuk menstabilkan harga barang. sedangkan 10% atau 3 dari 30 partisipan OPM belum mengetahui bahwa Operasi Pasar adalah cara pemerintah dalam menstabilkan harga barang.

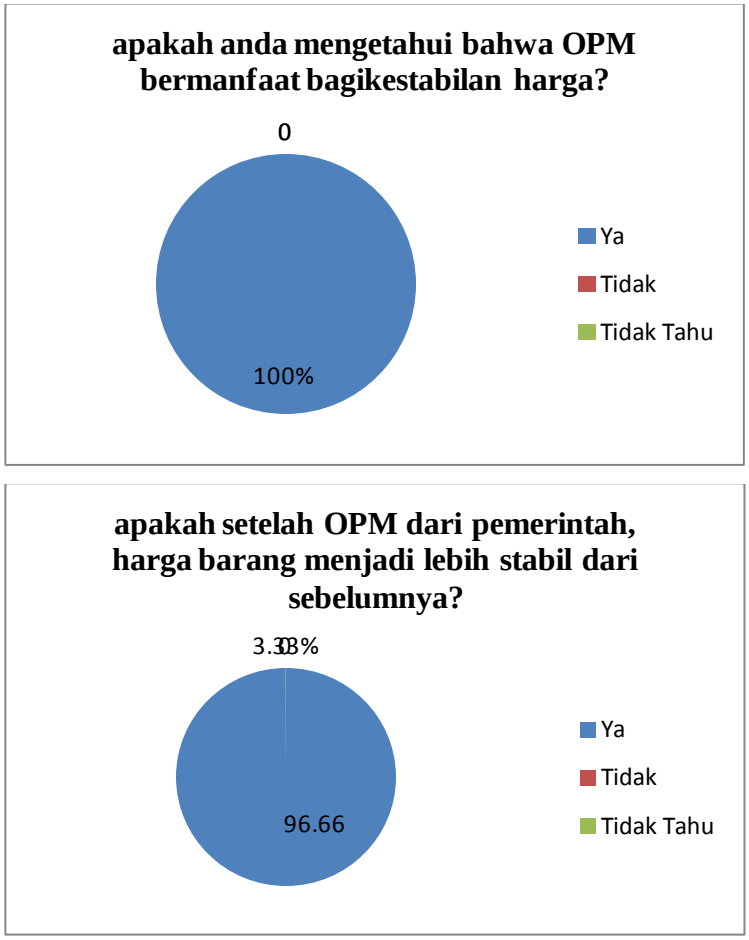
Hal ini sesuai Sumarni (2013) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi salah satunya menciptakan kestabilan. Salah satu upaya kestabilan suatu harga barang untuk masyarakat dengan dilaksanakannya kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM).



Gambar 4.10 Bagan Alokasi OPM

Dari gambar 4.10 diatas diketahui bahwa 76,66% atau 23 dari 30 partisipan yang pernah mengikuti OPM dari pemerintah mengetahui bahwa jumlah alokasi yang diberikan oleh pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat untuk menanggulangi kenaikan harga barang. Hal ini sesuai dengan prinsip alokasi yang dilakukan oleh pemerintah bahwasannya pemerintah menyediakan barang yang selanjutnya apabila barang dalam OPM tersebut dapat terserap habis oleh masyarakat maka dapat dikatakan program Operasi Pasar dari Pemerintah tersebut sukses. Sedangkan 23,33% atau 7 dari 30 orang partisipan merasa bahwa barang yang telah dialokasikan lewat Operasi Pasar Murni (OPM) belum mencukupi kebutuhan.

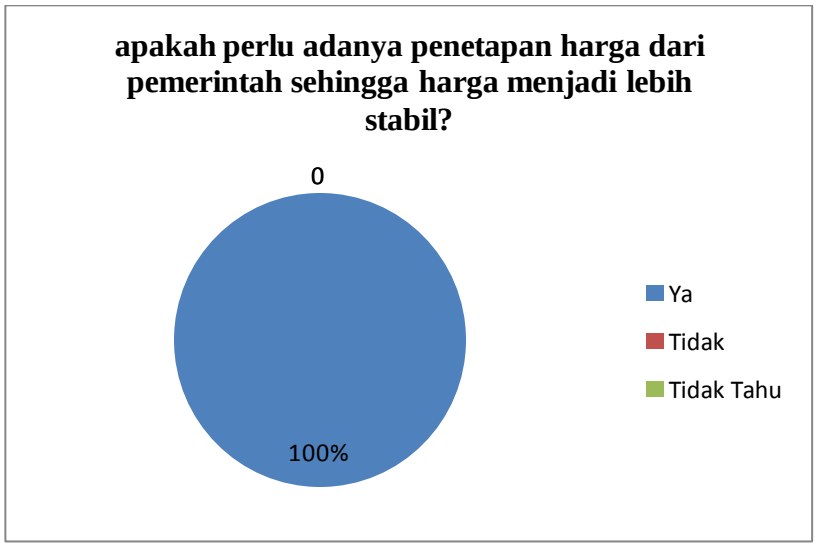
5. Analisis Kestabilan Harga



Gambar 4.11 Bagan Manfaat OPM Terhadap Kestabilan Harga

Dari gambar 4.11 diatas diketahui bahwa 100% atau 30 dari 30 orang yang telah ikut berpartisipasi dalam Operasi Pasar Murni (OPM) dari pemerintah mengetahui apabila program Operasi Pasar Murni (OPM) tersebut bermanfaat bagi kestabilan harga. Hal ini sesuai dengan tujuan dari adanya Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah yaitu untuk menjaga kestabilan harga sehingga harga barang komoditas terhindar dari lonjakan yang tinggi ketika terjadi inflasi.

Dari data diatas diketahui bahwa 96,66% atau 29 dari 30 partisipan yang pernah mengikuti OPM dari pemerintah mengetahui bahwa harga barang setelah diadakan OPM dari pemerintah menjadi lebih stabil dibanding jika tidak adanya kegiatan OPM. Hal ini karena pemerintah memberikan subsidi berang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khusunya masyarakat yang kurang mampu untuk dapat mengikuti kegiatan OPM sehingga ketika pada saat harga barang tersebut mengalami kenaikan maka partisipan OPM tersebut masih memiliki barang tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup.



Gambar 4.12 Bagan Penetapan Harga

Dari gambar 4.12 tersebut diketahui bahwa 100% atau 30 dari 30 orang pasrtisipan yang pernah mengikuti kegiatan OPM dari pemerintah setuju dengan adanya penertapan harga dari pemerintah. Berdasarkan analisis mengenai penetapan harga bahwa pemerintah juga melakukan penetapan harga pada saat sebelum dilakukannya kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM). Penetapan harga tersebut berada dibawah

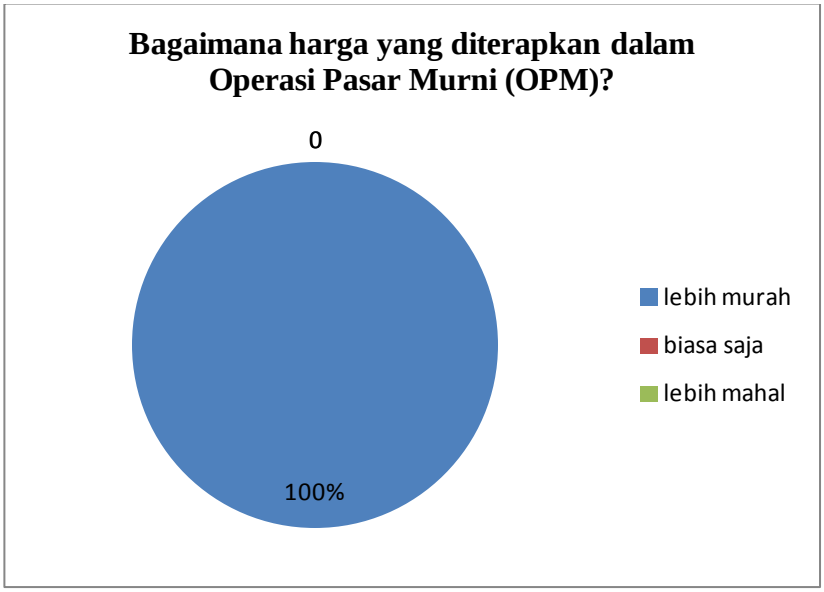
harga pasar sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkannya.Hal ini sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi mengenai perlunya adanya penertapan harga untuk mencapai suatu kestabilan harga, hal ini dilakukan untuk menciptakan kestabilan harga dikalangan masyarakat masyarakat dan menciptakan kemaslahatan umat.



Gambar 4.13 Bagan Kesepakatan Harga

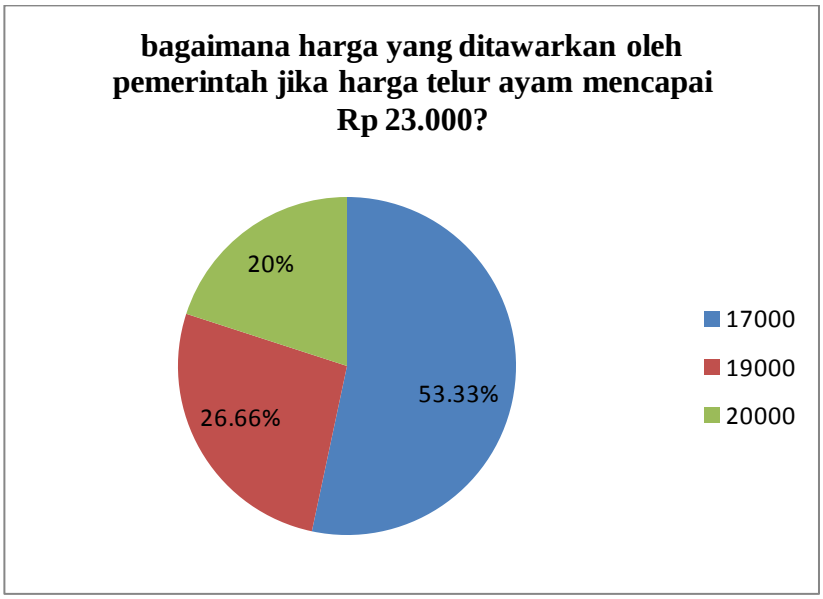
Dari gambar 4.13 tersebut dapat diketahui bahwa 100% atau 30 dari 30 orang partisipan yang pernah mengikuti kegiatan OPM sepakat dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi mengenai adanya kesepakatan harga sehingga tidak menciptakan ketimpangan dan kedzaliman. Masyarakat sepakat dengan adanya OPM dari pemerintah karena harga yang ditawarkan relative lebih murah dari harga pasar saat ini karena mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk mengurangi harga sehingga barang Operasi Pasar Murni (OPM) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

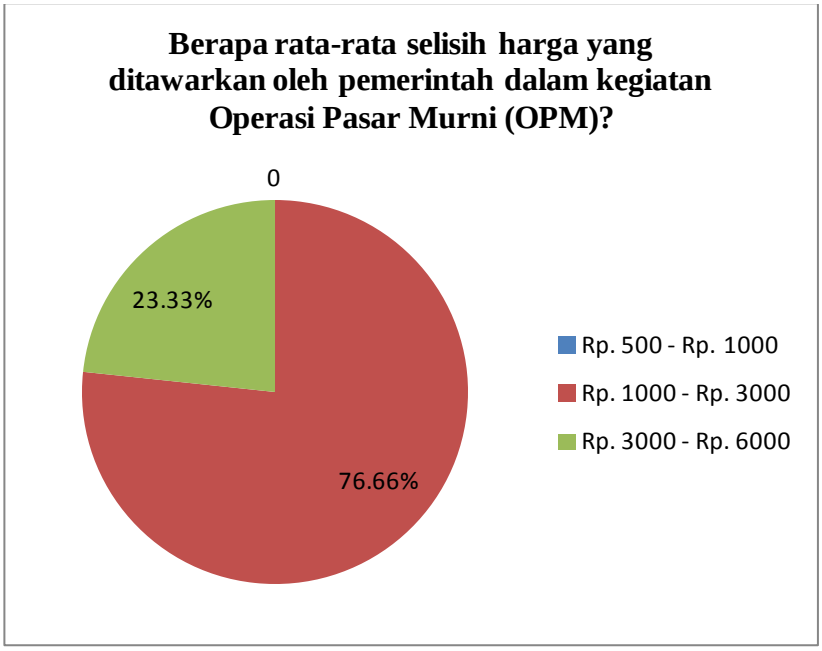
6. Analisis Operasi Pasar Murni



Gambar 4.14 Bagan Penerapan Harga dalam OPM

Berdasarkan gambar 4.14 diagram diatas dapat diketahui bahwa 100% atau 30 dari 30 orang partisipan yang pernah mengikuti kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan pemerintah sepakat bahwa harga yang ditawarkan oleh pemerintah dalam kegiatan tersebut lebih murah dari pada harga barang di pasar pada saat itu. hal ini sesuai dengan prinsip Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan subsidi mengenai harga barang tersebut sehingga menjadi lebih murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat khusunya yang membutuhkan.





Gambar 4.15 Bagan selisih harga dalam OPM

dari gambar 4.15 diatas mengenai harga yang ditawarkan pemerintah jika telur mencapai Rp. 23.000 diketahui bahwa sebesar 53,33% atau 16 dari 30 orang partisipan yang pernah mengikuti kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) pemerintah menawarkan harga

sebesar Rp. 17.000. jika bandingkan dengan harga awal maka terjadi pemotongan harga sebesar 26,10% dalam kegiatan OPM tersebut. Sebanyak 26,66% atau 8 dari 30 partisipan yang pernah mengikuti kegiatan OPM pemerintah menawarkan harga sebesar Rp. 19.000. jika dibandingkan dengan harga awal maka terjadi pemotongan harga sebesar 17,39% dalam kegiatan OPM tersebut. Dan 20% atau 6 dari 30 partisipan yang pernah mengikuti kegiatan OPM pemerintah menawarkan harga sebesar Rp. 20.000. jika dibandingkan dengan harga awal maka terjadi pemotongan harga sebesar 13,04% dalam kegiatan OPM tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip dilaksanakannya Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilaksanakan oleh pemerintah yait pemotongan harga sebesar 10% - 15% dari harga awal dengan semakin bertambahnya subsidi pemerintah maka harga yang ditawarkan cenderung lebih murah kembali bahkan DISPERINDAG DIY dalam melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) pemotongan harga hingga mencapai 26,10% dari harga awal.

Dari hasil data mengenai selisih harga tersebut dapat diketahui bahwa 76,66% atau sebanyak 23 dari 30 orang partisipan yang pernah mengikuti kegiatan OPM yang dilakukan , selisih harga barang di pasar dan pada saat kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) berlangsung sebesar Rp. 3.000 – Rp. 6.000. Sedangkan 23,33% atau 7 orang dari 30 partisipan yang mengikuti kegiatan OPM yang dilakukan, selisih harga barang di pasar dan pada saat Operasi Pasar Murni (OPM) berlangsung sebesar Rp. 1.000 – Rp. 3.000. Hal ini sesuai dengan data harga yang ditawarkan oleh pemerintah dalam kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yaitu mayoritas pemotongan harga sebesar Rp. 3.000 – Rp. 6.000.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil paparan data analisis penelitian dapat dijelaskan pembahasan mengenai peran pemerintah dalam penyediaan barang komoditas melalui Operasi Pasar Murni (OPM) dengan hasil data karakteristik responden penerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) DISPERINDAG DIY. Sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah
   a. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian

      Peran pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga untuk masyarakat melalui berbagai program kebijakan salah satunya dengan cara Operasi Pasar Murni (OPM) hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menciptakan kemaslahatan umat. Dalam hal ini sesuai dengan Wilayah Hisbah. Dalam Wilayah Hisbah dalam konteks mualamah adalah segala bentuk aturan yang mengatur hubungan antar manusia baik seperti: jual beli, syirkah dan lainnya. dalam permasalahan ini kewenangan wilayah hisbah antara lain melarang serta mengawasi sebagai bentuk kecurangan seperti pengurangan baik ukuran maupun timbangan, dan segala bentuk praktek-praktek yang mengandung unsur hal yang tidak sesuai dengan moral.(Solikhin, 2005)

      Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY pada gambar 4.4 bahwa sebanyak 100% atau 30 orang dari 30 masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) dari pemerintah mengetahui bahwa terdapat kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) dan didukung dengan hasil data responden bahwa sebanyak 30 masyarakat tersebut, terdapat 28 orang atau sebanyak 93,33% masyarakat mengetahui bahwa Operasi Pasar Murni (OPM)

merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah. 2 dari 30 orang atau 6,66% orang tidak mengetahui bahwa Operasi Pasar Murni merupakan salah satu kebijakan pemerintah.

Dalam masa Rasulullah SAW praktek hisbah juga meliputi kebijakan Rasulullah SAW untuk mengurangi praktek-praktek kecurangan dalam pasar seperti ketika Rasulullah SAW berjalan ke Pasar Madinah, beliau bertemu dengan penjual makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya kedalam sebuah kantong yang berisi gandum dan ditemukannya gandum yang masih basah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Bahwa barang siapa yang menipu umatnya maka bukan termasuk umatnya". Hal penerapannya, DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan peran pemerintah dalam bidang ekonomi pandangan islam yang dikemukakan oleh Hidayatullah (2013) yaitu menjadi pengawas faktor utama penggerak perekonomian masyarakat.

b. Menghentikan Muamalah yang Diharamkan

Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY merupakan salah satu kegiatan untuk mengantisipasi adanya inflasi maupun segala bentuk kecurangan dalam harga seperti penimbunan. Dengan adanya Operasi Pasar Murni (OPM) maka kebutuhan masyarakat khususnya yang kurang mampu dapat terpenuhi. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yaitu sebanyak 100% atau 30 dari 30 orang mengetahui tentang apa itu Operasi Pasar Murni (OPM) dan sebanyak 93,33% atau 28 dari 30 orang mengetahui bahwa Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori yang dikemukakan

oleh Sumarti (2003) yaitu terdapat bentuk pertukaran dan penyaluran barang yang masuk kedalam pasar lalu disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menghentikan Muamalah yang diharamkan merupakan tujuan adanya dilaksanakan program Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya. Dengan adanya OPM yang baik maka dapat menciptakan kemaslahatan umat. Dalam QS Al Muthaffifin ayat 1-3 telah dijelaskan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣

"1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya melakukan kecurangan baik harga maupun penimbunan (ikhtikar) merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat karena hal tersebut dapat merugikan satu dengan yang lainnya dan secara tidak langsung juga mendhzolimi masyarakat.

c. Mematok Harga

Dalam kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY merupakan penerapan dari adanya pematokan harga dengan cara subsidi dan injeksi yang kemudian barang yang telah disubsidi disalurkan melalui kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) sehingga masyarakat yang mengikuti kegiatan

OPM khususnya masyarakat tidak mampu dapat menikmati manfaat OPM karena harga yang diterapkan lebih murah dan terjangkau.

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Hidayatullah (2013) mengenai peran pemerintah dalam hal ekonomi yaitu adanya pematokan harga. Dengan adanya pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah maka dapat menciptaka keadilan dan stabilisasi harga akibat dari adanya inflasi, kecurangan harga dll. hal tersebut juga sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi bahwasanya perlu adanya penetapan harga untuk menciptakan suatu keadilan dan kestabilan.

d. Alokasi

Pemerintah sebagai pelaku ekonomi mempunyai fungsi salah satunya adalah alokasi. Alokasi sebagai fungsi yang penting dalam menciptakan stabilisasi harga karena dengan tidak adanya alokasi yang baik maka dapat menciptakan kegagalan pasar *(market failure)*. Dalam kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mempunyai alokasi barang dengan jumlah yang telah ditetapkan yaitu antara 150-200 bungkus. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai alokasi barang yaitu sebanyak 76,66% atau 23 dari 30 orang responden mengetahui bahwa jumlah alokasi yang diberikan oleh pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat untuk menanggulangi kenaikan harga barang.

Hal tersebut kurang sesuai dengan pemikiran Sumarni (2013) jika dikaitkan dengan program Operasi Pasar Murni mengenai peran pemerintah dalam ekonomi salah satunya adalah alokasi yaitu pengadaan barang seperti pembuatan jalan, jaringan telepon.

Sedangkan alokasi yang sesuai dengan Operasi Pasar Murni (OPM) adalah mengenai alokasi barang yang akan didistribusikan yang selanjutnya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

e. Distribusi

Distribusi merupakan prinsip yang tepat sesuai dengan maksud dan tujuan mempermudah untuk memperoleh barang pada saat dibutuhkan. Dalam Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY dalam hal ketepatan distribusi mempunyai sasaran yaitu masyarakat yang hidup dibawah standard kemiskinan dan masyarakat prasejahtera. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai sasaran distribusi OPM bahwa sebanyak 90% atau 27 dari 30 orang mengetahui bahwa yang dapat mengikuti program OPM adalah masyarakat yang berada dalam standar garis kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi yaitu sesuai dengan nilai-nilai kadilan yaitu adanya keseimbangan antara potensi individu baik moral maupun materil. Dalam QS. Al Hujurat (49) ayat 9 telah dijelaskan:

وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٩

" .... Dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil"

Dalam ayat ini dijelaskan kepada kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Keadilan yang ideal adalah keadilan yang tidak terdapat kedzaliman terhadap seorangpun didalamnya. Setiap orang berhak mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Mengenai kecepatan waktu distribusi, DISPERINDAG DIY melakukan kegiatan OPM sekitar 1-2 sebelum memasuki hari besar atau hari raya seperti Natal dan Idul Fitri. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai ketepatan waktu dilaksanakannya OPM yaitu sebanyak 70% atau 21 dari 30 responden mengetahui bahwa kegiatan OPM yang dilakukan oleh pemerintah telah tepat waktu.

Sedangkan dalam keamanan barang, DISPERINDAG DIY bekerjasama dengan distributor barang sehingga ketika terjadi kerusakan sebelum barang diterima oleh masyarkat, barang tersebut dapat ditukar dengan barang yang baru. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai keadaan barang diketahui bahwa sebanyak 100% atau 30 dari 30 responden mengetahui bahwa barang yang diterima oleh masyarakat dalam keadaan baik.

Hal ini sesuai dengan pandangan Sumarni (2003) mengenai fungsi pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu distribusi yaitu sebagai pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Dalam QS. Adz Dzariyat (51) ayat 19 dijelaskan dalam ayat berikut:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya disetiap harta kita terdapat hak-hak untuk orang miskin yang secara tidak langsung memerintahkan umat muslim untuk mendistribusikan hartanya untuk membantu sesame manusia guna mencukupi kebutuhan kaum yang membutuhkan.

f. Stabilisasi

Dalam menciptakan stabilisasi DISPERINDAG DIY melakukan kegiatan 2 hal salah satunya adalah Operasi Pasar Murni (OPM). Hal ini didukung dengan data respondeng yakni diketahui bahwa sebanyak 90% atau 27 dari 30 orang partisipan yang telah mengikuti Operasi Pasar Murni (OPM) mengetahui bahwa Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan salah satu cara pemerintah untuk menstabilkan harga barang. sedangkan 10% atau 3 dari 30 partisipan OPM belum mengetahui bahwa Operasi Pasar adalah cara pemerintah dalam menstabilkan harga barang.

Hal ini sesuai Sumarni (2013) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi salah satunya menciptakan kestabilan. Salah satu upaya kestabilan suatu harga barang untuk masyarakat dengan dilaksanakannya kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM).

2. Stabilisasi Harga

Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga (Maisyarah et al., 2014)

Stabilisasi harga yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY melalui program Operasi Pasar Murni (OPM) yaitu berupa penetapan harga.barang komoditas yang diterapkan dibawah harga pasar sehinggamasyarakat yang membutuhkan tetap dapat mengkonsumsi barang komoditas tersebut

dengan tujuan untuk menciptakan kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai perlu adanya penetapan harga yaitu sebanyak 100% atau 30 dari 30 responden setuju bahwa perlu adanya penetapan harga oleh pemerintah untuk menciptakan kestabilan harga dan mengenai kesepatan harga diketahui bahwa sebanyak 100% atau 30 dari 30 responden sepakat mengenai harga yang ditawarkan oleh pemerintah dalam kegiatan OPM tersebut.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yususf Qardhawi dalam mencapai suatu kestabilan harga dengan cara penetapan suatu harga dan kesepakatan harga. Bahwa kestabilah suatu harga dipengaruhi oleh penentuan harga. Selanjutnya Qardhawi menyatakan jika dalam penentuan suatu harga tersebut untuk menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan harga dibawah harga resmi. Maka hal tersebut diperbolehkan dan wajib diterapkan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Dalam perkara ini pihak pemerintah wajib menetapkan harga tersebut supaya pedagang menjual dengan harga yang sesuai demi terciptanya suatu keadilan sebagai mana diminta oleh Allah SWT.

3. Operasi Pasar Murni

Menurut Hessie (2009) Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga barang komoditas dengan cara pemotongan harga sekitar 10-15% dibawah harga pasar. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai penawaran harga dari pemerintah diketahui sebanyak 53,33% atau 16 dari 30 responden mayoritas mengetahui jika harga telur dipasar mencapai Rp. 23.000 maka harga telur

dalam kegiatan OPM mencapai Rp. 17.000 dan selain itu mengenai selisih harga diketahui tersebut sebanyak 76,66% atau 23 dari 30 mengetahui bahwa selisih harga saat terjadi OPM tersebut antara Rp. 3.000 hingga Rp. 6.000.

Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Hessie(2009) Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga barang komoditas dengan cara pemotongan harga sekitar 10%-15% dibawah harga pasar. Dengan adanya pemotongan yang mencapai 26,66% bahkan lebih dari harga normal, maka dapat disimpulkan bahwa program Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan indikator yang telah ada yaitu pemotongan harga antara 10%-15% bahkan jika lebih besar lagi maka harga barang kebutuhan masyarakat semakin murah dan semakin terjangkau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian tentang bagaimana intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) perspektif ekonomi islam maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Dalam penerapan peran pemerintah yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan 3 peran pemerintah dalam padangan islam yaitu sebagai pengawas faktor utama penggerak ekonomi, sebagai penghenti muamalah yang diharamkan dan sebagai pematok harga. Pada Alokasi barang, Distribusi dan Stabilisasi yang telah dilakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan 3 peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi.

Dalam stabilisasi harga menurut perspektif Ekonomi Islam yang diterapkan DISPERINDAG DIY dalam Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya telah sesuai dengan penetapan harga dan kesepakatan harga yang dikemukakan Yusuf Qardhawi.

Dalam penerapan harga pada saat dilakukan Operasi Pasar Murni, DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan konsep harga Operasi Pasar pada umumnya yaitu pemotongan harga antara 10%-15%.

B. SARAN

1. Untuk Pihak DISPERINDAG DIY selaku pelaksana program Operasi Pasar Murni (OPM) dan Komoditas Lainnya.
   a. Dalam melakukan kegiatan, perlu menimbang dan meninjau kembali tempat-tempat lain yang mebutuhkan untuk diadakannya Operasi Pasar Murni (OPM) serta menambah distributor barang sehingga kebutuhan masyarakat akan barang komoditas disuatu tempat tersebut dapat lebih terjangkau.
   b. Lebih mengembangan kinerja Operasi Pasar Murni (OPM) dan Komoditas lainnya sehingga dapat berjalan optimal sehingga dapat menstabilkan harga lebih optimal.
2. Peneliti Selanjutya

Ditujukan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam peneltian yang akan dilakukan berikutnya. Peneltian yang peneliti lakukan ini hanya meliputi operasional program Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya yang dilakukan oleh pihak DISPERINDAG DIY. Mungkin dimasa yang akan datang perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan metode yang berbeda-beda untuk mengetahui bagaimana menjaga stabilisasi harga supaya lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Ketahanan Pangan. (2017). Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan 2016. *Kemeterian Pertanian*.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). Data Masyarakat Miskin 2017 (Provinsi). Retrieved January 1, 2017, from BPS.go.id

Birusman Nuryadin, H. M. (2007). Harga Dalam Perspektif Islam. *Mazahib*, *4*(1), 86–99.

BPS. (2018). Indeks harga konsumen dan inflasi bulanan Indonesia. Retrieved January 21, 2018, from Bps.go.id

Dharmmesta, B. S. (2008). Strategi distribusi.

Hakim, M. A. (2015). Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*, *8*(1), 19–40.

Hessie, R. (2009). Analisis Produksi dan Konsumsi Beras Dalam Negeri serta Implikasinya terhadap Swasembada Beras di Indonesia, 1–107. Retrieved from http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/14198/H09rhe.pdf

Hidayatullah, I. (2013). Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam, 1–43. Retrieved from http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-I-Peran-Pemerintah1.pdf

MA, I. A. K. S. (2003). Ekonomi Makro Islam (p. 224). jakarta: Penerbit IIIT Indonesia.

Maisyarah, A., Pratiwi, A., & Sutopo, W. (2014). Model Penentuan Operasi Pasar Untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah, 151–167.

Munir, M. (2006). Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam.

Muslich, M. . (2007). Bisnis Syariah perspektif muamalah dan manajemen (1st ed., p. 157). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Nofrianto. (2009). Distribusi Pendapatan dan Pemenuhan Kebutuhan dalam Ekonomi Islam, *VIII*(2), 375–396.

Nuryanti, S. (2005). Analisa keseimbangan sistem penawaran dan permintaan beras di Indonesia, *23*, 71–81.

Priyo. (1966). Indikator Inflasi.

Purwanta. (2003). Harga keseimbangan pasar (pp. 1–41).

Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam (p. 201). jakarta: Gema Insani Press.

Rahmawaty, A. (2014). Menbagun Sistem Distribusi Prefektif Ekonomi Islam.

Rukaesih A. Maolani, U. C. (2015). *Metodologi penelitian prndidikan*. jakarta: RajaGrafindo Persada.

Saifuddin A. (2010). *Metode Penelitian*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Solikhin, I. (2005). Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam, *3*(1), 1–8.

Sukandar, D., Suhanda, N. S., Amalia, L., & Khairunisa, D. (2008). Analisis Diskriminan Untuk Menentukan Indikator Garis Kemiskinan. *Gizi Dan Pangan*, *3*(2), 94–100.

Sumarni. (2013). ″Intervensi Pemerintah″ Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi. *Economica*, *1*(2), 45–60. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/43003-ID-3intervensi-pemerintah3-antara-kebutuhan-dan-penolakan-di-bidang-ekonomi.pdf

Supardi. (2015). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. yogyakarta: UII Press.

Widodo, T. (2013). Studi Tentang Peranan Unit Pasar, *1*(112), 1–7.

Wulandari, F. H. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan.

LAMPIRAN

WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILISASI HARGA MELALUI OPERASI PASAR MURNI (OPM) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Maret 2018

Durasi Wawancara: 08.30 – 09.42

Identitas Diri

Nama : Yuna Pancawati, SE. MSI

Usia : -

Agama : Islam

Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri DISPERINDAG DIY

1. Apa yang dilakukan DISPERINDAG DIY sebelum melakukan Operasi Pasar Murni (OPM)?

   Jawab :
   Dengan melakukan pemantauan harga terlebih dahulu yang dilakukan setiap hari di 3 pasar yang telah disepakati yaitu : Pasar Beringharjo, Pasar Demangan dan Pasar Kranggan. Penentuan 3 pasar tersebut sesuai dengan ketetapan Kementrian Perdagangan DIY.

2. Selain menjaga stabilisasi harga apa tujuan dari adanya Operasi Pasar?

   Jawab:
   Untuk membantu masyarakat yang berada dibawah garis standar kemiskinan/kurang mampu dan pra sejahtera sehingga masyarakat tetap dapat menikmati barang tersebut.

3. Apa kriteria Operasi Pasar dapat dikatakan sukses/berhasil?

   Jawab:

Operasi Pasar dikatakan berhasil/suskes apabila barang yang telah kami sediakan (barang komoditi) terserap habis oleh masyarakat yang membutuhkan.

4. Dalam Pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya, pihak DISPERINDAG DIY bekerjasama dengan siapa saja?

   Jawab:
   Dalam pelaksanaan tersebut pihak DISPERINDAG DIY bekerjasama dengan pihak BULOG Divre, Distributor bahan pokok (komoditas), Pihak Kabupaten atau se-kecamatan tempat dimana akan dilakukan Operasi Pasar dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) DIY

5. Permasalahan apa yang sering dialami saat Operasi Pasar?

   Jawab :
   Masalah kebanyakan dalam bidang teknis saja seperti barang distributor yang telat datang atau hujan yang tiba-tiba datang saat operasi pasar berlangsung.

6. Bagaimana nilai-nilai keislaman dalam program Operasi Pasar Murni ini?

   Jawab:
   Dengan mengutamakan produk-produk halal dan bermanfaat bagi sesama manusia serta turut membantu masyarakat yang kurang mampu/prasejahtera.

7. Bagaimana jika Program OPM tidak berhasil? Apakah ada program selain OPM?

   Jawab:
   Apabila OPM tidak berhasil dan harga tidak kunjung stabil maka pemerintah melakukan suatu kebijakan seperti melakukan impor barang dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Hari/ Tanggal : Sabtu, 31 Maret 2018

Durasi Wawancara: 13.30 – 14.15

Identitas Diri

Nama : Ir. Guntur Wahyu A.

Usia : -

Agama : Islam

Jabatan : Kepala Sie Pengadaan dan Penyaluran

1. Apa yang dilakukan DISPERINDAG DIY sebelum melakukan Operasi Pasar Murni (OPM)?

   Jawab:
   Melakukan rapat koordinasi se-kabupaten, baik dengan pihak desa, kecamatan, dan distributor yang dituju dalam melakukan OPM.

2. Selain menjaga stabilisasi harga, apa tujuan dari adanya Operasi Pasar Murni?

   Jawab:
   Membantu masyarakat khusunya masyarakat prasejahtera dan masyarakat umum untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

3. Dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murni, Disperindag DIY bekerjasama dengan siapa?

   Jawab:
   DISPERINDAG DIY bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI), Sagas Pangan DIY dan Distributor Bahan Pokok.

4. Apa masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan OPM, selain permasalahan cuaca?

   Jawab:
   Paket bahan yang dijual dengan jumlah yang terbatas sehingga hanya sedikit masyarakat yang mendapatkan bahan pokok tersebut.

5. Bagaimana nilai-nilai keislaman dalam program Operasi Pasar Murni ini, selain menggunakan produk yang halal?

   Jawab:
   Berupa subsidi harga dari pemerintah untuk meringankan harga bagi masyarakat khususnya yang prasejahtera

6. Apa yang menyebabkan ketidak stabilan harga pasar?

   Jawab:
   Karena harga pasar ditentuka oleh *supply* dan *demand* maka harga dikatakan stabil jika mencapai titik pertemuan tersebut. Kebanyakan indikasi ketidakstabilan terjadi pada rantai distribusi, seperti adanya penimbunan bahan pokok dan mencari kesempatan untuk emnjual harga dengan harga yang lebih tinggi karena kelangkaan barang itu.

7. Bagaimana jika Program OPM tidak berhasil? Apakah ada program selain OPM?

   Jawab:
   Kita lihat dulu permasalahannya dimana, kita tetap optimalkan OPM yaitu dengan memperbanyak titik-titik untuk melakukan operasi yang melibatkan seluruh perangkat desa. Kalaupun harus import maka harus bekerjasama dengan kementrian perdagangan terlebih dahulu.



Dokumentasi mengenai Rapat Koordinasi sebelum dilaksanakan OPM



Dokumentasi Pelaksanaan OPM di Kedung Keris, Gunung Kidul, DIY



Dokumentasi Pelaksanaan OPM di Kedung Keris, Gunung Kidul, DIY



Dokumentasi Pelaksanaan OPM di Kedung Keris, Gunung Kidul, DIY

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ZAKKA HIFZHAN HANIFAN FADHLULLOH lahir di Yogyakarta, 23 Desember 1995. Ia bertempat tinggal di Bangunrejo TR I/1739 RT 47 RW 10 Kricak Kidul, Tegalrejo, KODYA, DIY 55242. Ia menamatkan sekolah dasar pada tahun 2008 di SD Muhammadiyah Karangwaru. Pada tahun 2011, ia menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama di SMP IT & Pondok Pesantren Bina Umat Mulia. Pada tahun 2014, ia menjadi tamatan SMA di MAN Yogyakarta 1. Hingga akhirnya memasuki jenjang Perguruan Tinggi (PT) di Universitas Islam Indonesia hingga tahun 2018.

Tahun 2011 hingga 2017 ia menjabat sebagai Ketua Kepemudaan dan pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Kemasjidan pada tahun 2012 sampai 2013. Sekarang ditempat tinggalnya, ia sekarang menjabat sebagai Direktur TPA Masjid Al Furqon, Ketua Steering Committee Pemuda Bangunrejo dan Sekretaris RT 45 Periode 1.

LAMPIRAN KUISIONER

Nama : ..... (boleh diisi boleh tidak)

Alamat/ Kecamatan : .....

1. Berapa usia anda?
   a. Kurang dari 20 tahun
   b. 21 – 30 tahun
   c. 31 – 40 tahun
   d. Lebih dari 40 tahun

2. Apa pekerjaan anda?
   a. Petani
   b. Pedagang
   c. Wirausaha
   d. Lainnya .....

3. Berapa pendapatan anda pertahun?
   a. < Rp.500.000
   b. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000
   c. Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000
   d. > Rp. 3.000.000

INTERVENSI PEMERINTAH

1. Apa anda mengenal Operasi Pasar Murni (OPM) dari pemerintah?
   a. Ya
   b. Tidak

2. Apakah anda mengetahui bahwa Operasi Pasar merupakan salah satu bentuk intervensi/kebijakan pemerintah?
   a. Ya
   b. Tidak
   c. Tidak tahu

3. Apakah harga dalam Operasi Pasar telah diinformasikan sebelumnya lewat media (brosur/tiket dll) ?
   a. Ya
   b. Tidak

c. Tidak tahu

4. Apakah barang yang didistribusikan pemerintah melalui Operasi Pasar sudah tepat waktu/tidak terlambat?
   a. Ya
   b. Tidak

5. Bagaimana keadaan barang yang telah diterima oleh anda dari program Operasi Pasar Murni?
   a. Barang baik
   b. Barang banyak yang rusak

6. Apakah barang yang didistribusikan lewat Operasi pasar Murni telah tepat sasaran, yaitu warga yang kurang mampu?
   a. Ya
   b. Tidak
   c. Tidak tahu

7. Apakah pemerintah telah berupaya menciptakan kestabilan harga melalui berbagai program salah salah satunya Operasi Pasar Murni?
   a. Sudah
   b. Belum
8. Apakah dalam alokasi jumlah barang dalam OPM telah mencukupi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan?
   a. Sudah
   b. Belum

KESTABILAN HARGA

1. Apakah anda mengetahui bahwa Operasi Pasar bermanfaat bagi kestabilan harga
   a. Ya
   b. Tidak
   c. Tidak tahu

2. Apakah setelah Operasi Pasar Murni (OPM) dari pemerintah, harga barang di pasar menjadi lebih stabil dari sebelumnya?
   a. Ya
   b. Tidak
   c. Tidak tahu

3. Apakah perlu adanya penetapan harga dari pemerintah sehingga harga barang menjadi lebih stabil dan murah?
   a. Ya
   b. Tidak
   c. Tidak tahu

4. Apakah anda sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah dalam kegiatan Operasi Pasar Murni?
   a. Ya
   b. Tidak

OPERASI PASAR MURNI

1. Bagaimana harga yang diterapkan dalam Operasi Pasar Murni (OPM)?
   a. Lebih murah
   b. Sama saja
   c. Terlalu mahal

2. Berapa rata-rata harga yang ditawarkan oleh pemerintah dalam Operasi Pasar Murni ketika harga Telur Ayam dipasar mencapai Rp.23.000?
   a. Rp. 17.000
   b. Rp. 19.000
   c. Rp. 20.000

3. Berapa rata-rata selisis harga yang ditawarkan pemerintah dalam kegiatan Operasi Pasar Murni?
   a. Rp. 500 – 1.000
   b. Rp. 1.000 – 3.000
   c. Rp. 3.000 – 6.000

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Kepada Yth :

Nomor : 074/3464/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan DIY

Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari	:	Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Nomor	:	908/DEK/70/DAS/FIAI/III/2018
Tanggal	:	17 Maret 2018
Perihal	:	Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah skripsi dengan judul proposal: **"INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILISASI HARGA MELALUI OPERASI PASAR MURNI (OPM) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"** kepada:

Nama	:	ZAKKA HIFZHAN HANIFAN F
NIM	:	14423010
No. HP/Identitas	:	087739196380 / 3471012312950002
Prodi/Jurusan	:	Ekonomi Islam
Fakultas/PT	:	Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Lokasi Penetitan	:	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY
Waktu Penelitian	:	21 Maret 2018 s.d. 21 September 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19801026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.